



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 /PMK.02/2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 meliputi:
  - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
  - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sub keluaran (*sub output*) Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan, dan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3); dan

- b. sub keluaran (*sub output*) Penelitian.

### Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2019;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2020; dan/atau
- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

#### Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 847

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 1997031 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/PMK.02/2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNI3

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)</b>			
	a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	63.700.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	422.200.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	770.300.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.505.100.000	
	5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.737.100.000	
	b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
2	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)</b>			
	a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	21.300.000	
	2) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	139.900.000	
	3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	256.800.000	
	4) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	501.800.000	
	5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker	1 Dokumen	579.100.000	
	b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L			
	1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
3	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)</b>			
	a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	1 Per Peserta	30.261.000	
	b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	22.125.000	
	c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	20.230.000	
4	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)</b>			
	a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II	1 Per Peserta	9.296.000	
	b. Diklat Prajabatan Golongan III	1 Per Peserta	9.296.000	
	c. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Per Peserta	2.242.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
5	<b>Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)</b>			
	a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Aceh	1 LHA	45.400.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	43.900.000	
	3) Riau	1 LHA	43.600.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	42.900.000	
	5) Jambi	1 LHA	39.300.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	42.300.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	41.800.000	
	8) Lampung	1 LHA	35.800.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	40.100.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	39.300.000	
	11) Banten	1 LHA	33.300.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	32.400.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	23.300.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	37.700.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	42.000.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	42.000.000	
	17) Bali	1 LHA	46.600.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	43.400.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	47.900.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	40.400.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	41.700.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	41.200.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	48.400.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	46.300.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	49.500.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	49.100.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	49.600.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	45.400.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	51.200.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	47.100.000	
	31) Maluku	1 LHA	55.100.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	52.600.000	
	33) Papua	1 LHA	63.500.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	66.600.000	
	b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Aceh	1 LHA	58.300.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000	
	3) Riau	1 LHA	56.500.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000	
	5) Jambi	1 LHA	52.200.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
	8) Lampung	1 LHA	48.700.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000	
	11) Banten	1 LHA	46.200.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	54.900.000	
	17) Bali	1 LHA	59.500.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	59.200.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
	31) Maluku	1 LHA	68.000.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	65.500.000	
	33) Papua	1 LHA	76.400.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
	c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Aceh	1 LHA	125.800.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
	3) Riau	1 LHA	142.700.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
	5) Jambi	1 LHA	109.400.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
	8) Lampung	1 LHA	93.600.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
	11) Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
	16) Bali	1 LHA	161.600.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
	30) Maluku	1 LHA	157.900.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	142.700.000	
	32) Papua	1 LHA	203.000.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	187.200.000	
<b>6</b>	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNi3</b>			
	a. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi- <i>Reprint</i>			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.060.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.060.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.060.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	99.060.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	99.060.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
	b. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	360.840.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	528.880.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	626.780.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
	c. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	388.825.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.295.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	649.235.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.435.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.935.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.625.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.275.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.730.000	
	d. SBK Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	390.340.000	
	2) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	485.840.000	
	3) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	653.880.000	
	4) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	751.780.000	
	5) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	860.550.000	
	6) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	975.670.000	
	7) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.137.590.000	
	8) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.237.790.000	
	9) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.410.430.000	
	10) Dokumen RSNi3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.510.630.000	

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>SBK Riset Pembinaan/Kapasitas</b>	1 Laporan	20.000.000	
<b>2</b>	<b>SBK Riset Dasar</b>			
	a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	161.320.000	
	b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	145.670.000	
	c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000	
	d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000	
	e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	100.000.000	
	f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	245.000.000	
	g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	189.960.000	
	h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	161.050.000	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000	
	j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000	
	k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000	
	l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000	
	n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000	
	o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000	
	p. SBK Riset Dasar Teoritis	1 Laporan	50.546.200	
<b>3</b>	<b>SBK Riset Terapan</b>			
	a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000	
	b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	231.900.000	
	c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000	
	d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000	
	e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	218.400.000	
	f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000	
	g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000	
	h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000	
	i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000	
	j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	160.000.000	
	k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	175.000.000	
	l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000	
	n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000	
	o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000	
<b>4</b>	<b>SBK Riset Pengembangan</b>			
	a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000	
	b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	1.134.800.000	
	c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000	
	d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000	
	e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	412.500.000	
	f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000	
	g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	734.038.000	
	h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000	
	i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000	
	j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000	
<b>5</b>	<b>SBK Kajian Aktual Strategis</b>	1 Naskah Kebijakan	70.000.000	

PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK  
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNi3**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat  
SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.
- b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L  
SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK  
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat.

Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

- b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L

SBK Dokumen LAKIN untuk K/L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

**3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)**

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*.  
b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar prcyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)**

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*.  
b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar prcyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)**

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama  
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota  
SBK Audit Kinerja Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi  
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

**6. Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNI3**

SBK Dokumen RSNI3 adalah besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh *output* akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

## **B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

### **1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas**

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset

pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

## 2. **SBK Riset Dasar**

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

- b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan

energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.



- g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju  
SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- p. SBK Riset Dasar Teoritis  
SBK Riset Dasar Teoritis adalah kelompok ini melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk menncari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invensi*) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

### **3. SBK Riset Terapan**

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi

komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT

SBK Riset Terapan Bidang Fokus EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK

Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK

SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.

h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan

peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.

k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
- SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang

objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

#### **4. SBK Riset Pengembangan**

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan



veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan,

manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia.

f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.

i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan

penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

#### **5. SBK Kajian Aktual Strategis**

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) raskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

#### **Catatan Umum:**

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;

- e. buku nasional;
  - f. buku internasional;
  - g. naskah kebijakan;
  - h. artikel populer di media cetak;
  - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
  - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional
  - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;

- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;

- i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;

- m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;

- p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding* (ornamental);
  - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
  - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
  - v. prototipe laik *preklinis*;
  - w. herbal terstandar;
  - x. paten sederhana terdaftar;
  - y. merek dagang terdaftar;
  - z. desain industri terdaftar;
  - aa. rahasia dagang terdaftar;
  - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
  - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
  - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. paten sederhana terdaftar;
  - l. merek dagang terdaftar;
  - m. desain industri terdaftar;
  - n. rahasia dagang terdaftar;
  - o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;



- p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
  - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
  - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
  - n. paten sederhana terdaftar;
  - o. merek dagang terdaftar;
  - p. desain industri terdaftar;
  - q. rahasia dagang terdaftar;
  - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
  - t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
  - u. fitofarmaka.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
27	Material untuk produk biologi	50.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
  - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 69 /PMK.02/2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	<b>Badan Pemeriksa Keuangan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 LHP LK Pemerintah Pusat	1 LHP	12.244.343.000	
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penilaian Kompetensi</b>			
	2 Penilaian Kompetensi Pemeriksa	850 Laporan	7.190.451.000	
	<b>Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu</b>			
	3 Laporan Reviu SPM Kelembagaan	6 Laporan	7.098.357.000	
	4 Laporan Reviu atas Konsep Laporan Keuangan BPK	3 Laporan	3.602.986.000	
	5 Laporan Reviu atas Konsep RKA-K/L BPK	1 Laporan	519.204.000	
	6 Laporan Hasil Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	2.117.934.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 LHP Tematik	1 LHP	8.954.420.000	
	2 Laporan Hasil Evaluasi KAP	1 Laporan	212.187.000	
	3 LHP AKN I	1 LHP	1.077.755.000	
	4 LHP AKN II	1 LHP	1.634.315.000	
	5 LHP AKN III	1 LHP	869.283.000	
	6 LHP AKN IV	1 LHP	2.133.000.000	
	7 LHP AKN V	1 LHP	1.986.767.000	
	8 LHP AKN VI	1 LHP	2.325.243.000	
	9 LHP AKN VII	1 LHP	1.107.483.000	
	10 LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	728.521.000	
	11 Laporan Penelaahan Informasi Awal	1 Laporan	62.687.000	
	12 LHP BPK Perwakilan Prov. Aceh	1 LHP	499.894.000	
	13 LHP BPK Perwakilan Prov. Sumut	1 LHP	417.722.000	
	14 LHP BPK Perwakilan Prov. Riau	1 LHP	534.453.000	
	15 LHP BPK Perwakilan Prov. Kepri	1 LHP	407.608.000	
	16 LHP BPK Perwakilan Prov. Jambi	1 LHP	387.757.000	
	17 LHP BPK Perwakilan Prov. Sumbar	1 LHP	410.270.000	
	18 LHP BPK Perwakilan Prov. Sumsel	1 LHP	487.912.000	
	19 LHP BPK Perwakilan Prov. Lampung	1 LHP	373.904.000	
	20 LHP BPK Perwakilan Prov. Bengkulu	1 LHP	403.717.000	
	21 LHP BPK Perwakilan Prov. Kepulauan Babel	1 LHP	497.646.000	
	22 LHP BPK Perwakilan Prov. Banten	1 LHP	461.092.000	
	23 LHP BPK Perwakilan Prov. Jabar	1 LHP	470.590.000	
	24 LHP BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta	1 LHP	1.217.847.000	
	25 LHP BPK Perwakilan Prov. Jateng	1 LHP	439.851.000	
	26 LHP BPK Perwakilan Prov. DI Yogyakarta	1 LHP	471.808.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
27	LHP BPK Perwakilan Prov. Jatim	1 LHP	474.853.000	
28	LHP BPK Perwakilan Prov. Bali	1 LHP	499.466.000	
29	LHP BPK Perwakilan Prov. NTB	1 LHP	389.117.000	
30	LHP BPK Perwakilan Prov. NTT	1 LHP	446.163.000	
31	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalbar	1 LHP	447.905.000	
32	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalteng	1 LHP	405.818.000	
33	LHP BPK Perwakilan Prov. Kalsel	1 LHP	462.833.000	
34	LHP BPK Perwakilan Prov. Kaltim	1 LHP	560.461.000	
35	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulut	1 LHP	527.104.000	
36	LHP BPK Perwakilan Prov. Gorontalo	1 LHP	471.746.000	
37	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulbar	1 LHP	493.636.000	
38	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulse	1 LHP	481.679.000	
39	LHP BPK Perwakilan Prov. Sulteng	1 LHP	480.198.000	
40	LHP BPK Perwakilan Prov. Sultra	1 LHP	468.565.000	
41	LHP BPK Perwakilan Prov. Maluku	1 LHP	418.511.000	
42	LHP BPK Perwakilan Prov. Maluku Utara	1 LHP	421.829.000	
43	LHP BPK Perwakilan Prov. Papua	1 LHP	589.680.000	
44	LHP BPK Perwakilan Prov. Papua Barat	1 LHP	531.108.000	
45	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	530.588.000	
<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>				
<b>Laporan Pemantauan AKN I</b>				
46	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	60.800.000	
47	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.810.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN II</b>				
48	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	60.800.000	
49	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.810.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN III</b>				
50	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	66.220.000	
51	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	60.646.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN IV</b>				
52	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	67.195.000	
53	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.933.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN V</b>				
54	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	67.195.000	
55	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	131.991.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN VI</b>				
56	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	65.914.000	
57	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	64.565.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN VII</b>				
58	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	67.808.000	
59	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.933.000	
<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Aceh</b>				
60	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.633.000	
61	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.043.000	
<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumut</b>				
62	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.245.000	
63	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.244.000	
<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Riau</b>				
64	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.451.000	
65	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.152.000	
<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kepri</b>				
66	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.647.000	
67	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.348.000	
<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jambi</b>				
68	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	13.481.000	
69	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.438.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumbar</b>			
70	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.251.000	
71	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.860.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sumsel</b>			
72	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.709.000	
73	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.344.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Lampung</b>			
74	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	12.951.000	
75	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.708.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Bengkulu</b>			
76	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.089.000	
77	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.082.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Kepulauan Babel</b>			
78	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.513.000	
79	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.616.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Banten</b>			
80	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.091.000	
81	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	35.323.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jabar</b>			
82	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.111.000	
83	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.662.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta</b>			
84	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	121.938.000	
85	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	62.436.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Jateng</b>			
86	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	13.101.000	
87	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.049.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. DI Yogyakarta</b>			
88	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.983.000	
89	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	34.781.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jatim</b>			
90	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.069.000	
91	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.968.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bali</b>			
92	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	17.473.000	
93	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	38.269.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTB</b>			
94	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.019.000	
95	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.532.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTT</b>			
96	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.001.000	
97	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.978.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar</b>			
98	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.637.000	
99	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.031.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalteng</b>			
100	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.343.000	
101	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.311.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel</b>			
102	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.269.000	
103	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.690.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kaltim</b>			
104	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.765.000	
105	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.088.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulut</b>			
106	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.235.000	
107	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.436.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>			
108	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.975.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
109	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	34.356.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulbar</b>			
110	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.875.000	
111	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.852.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel</b>			
112	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.247.000	
113	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.045.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulteng</b>			
114	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	17.123.000	
115	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	36.148.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sultra</b>			
116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.405.000	
117	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.184.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku</b>			
118	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.961.000	
119	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	41.488.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara</b>			
120	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	17.879.000	
121	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	34.994.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Papua</b>			
122	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.975.000	
123	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	50.180.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Prov. Papua Barat</b>			
124	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.103.000	
125	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	41.384.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara</b>			
126	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.429.000	
127	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	38.581.000	
	<b>Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu</b>			
128	Laporan Pemberkasan	1 Laporan	136.837.000	
129	Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	233.606.000	
130	LHPI Inspektorat Utama	1 Laporan	244.567.000	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan Keuangan Negara</b>			
131	Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	712.957.000	
132	Diklat Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	215.345.000	
133	Diklat Sertifikasi Akuntan Publik	1 Angkatan	122.691.000	
134	Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	110.180.000	
135	Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	1 Angkatan	110.180.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	<b>Kepaniteraan</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Putusan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>			
	1 Putusan Perkara Pidana Umum	1.800 Perkara	3.594.454.000	
	2 Putusan Perkara Pidana Khusus	3.450 Perkara	5.258.957.000	
	3 Putusan Perkara Pidana Militer	350 Perkara	339.540.000	
	4 Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta rupiah	1.000 Perkara	833.630.000	
005.03	<b>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu</b>			
	1 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	610.000	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	977.000	
	3 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	440.000	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku Utara	1 perkara	936.000	
	5 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	1.553.000	
	6 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	571.000	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	897.000	
	8 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	402.000	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Banten	1 perkara	907.000	
	10 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	1.533.000	
	11 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	571.000	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	13 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	509.000	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.038.000	
	15 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.505.000	
	16 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	543.000	
	17 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	877.000	
	18 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	422.000	
	19 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	907.000	
	20 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	1.517.000	
	21 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	557.000	
	22 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	900.000	
	23 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	481.000	
	24 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	860.000	
	25 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	1.495.000	
	26 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	557.000	
	27 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	750.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
28	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	445.000	
29	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	681.000	
30	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	1.349.000	
31	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 perkara	556.000	
32	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	897.000	
33	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	427.000	
34	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	889.000	
35	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	1.349.000	
36	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	556.000	
37	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	897.000	
38	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	401.000	
39	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Yogyakarta	1 Perkara	889.000	
40	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	1.349.000	
41	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	557.000	
42	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	897.000	
43	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	399.000	
44	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	874.000	
45	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	1.349.000	
46	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	571.000	
47	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	900.000	
48	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	470.000	
49	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	853.000	
50	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.349.000	
51	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	572.000	
52	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.040.000	
53	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	487.000	
54	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.027.000	
55	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.367.000	
56	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	572.000	
57	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.040.000	
58	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	487.000	
59	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.027.000	
60	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.407.000	
61	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	572.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
62	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	1.040.000	
63	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	487.000	
64	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.027.000	
65	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.367.000	
66	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	572.000	
67	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.040.000	
68	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	487.000	
69	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.027.000	
70	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.457.000	
71	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	572.000	
72	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.040.000	
73	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	487.000	
74	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.027.000	
75	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.367.000	
76	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	572.000	
77	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.040.000	
78	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	487.000	
79	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Lampung	1 Perkara	1.027.000	
80	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.407.000	
81	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	580.000	
82	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	938.000	
83	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	399.000	
84	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Kalimantan Barat	1 Perkara	890.000	
85	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	1.507.000	
86	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	540.000	
87	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	937.000	
88	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	397.000	
89	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	880.000	
90	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	1.501.000	
91	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	550.000	
92	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	897.000	
93	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	398.000	
94	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	880.000	
95	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	1.501.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
96	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	550.000	
97	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	897.000	
98	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	398.000	
99	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	890.000	
100	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	1.533.000	
101	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	550.000	
102	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	897.000	
103	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	395.000	
104	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	880.000	
105	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	1.501.000	
106	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	411.000	
107	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	902.000	
108	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	402.000	
109	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	880.000	
110	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	1.515.000	
111	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	580.000	
112	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	937.000	
113	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	405.000	
114	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	641.000	
115	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	1.541.000	
116	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	543.000	
117	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	876.000	
118	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	523.000	
119	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	647.000	
120	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	1.515.000	
121	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	669.000	
122	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.056.000	
123	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	569.000	
124	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku	1 Perkara	920.000	
125	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.522.000	
126	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	571.000	
127	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	916.000	
128	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	560.000	
129	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	956.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
130	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.567.000	
131	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	557.000	
132	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	897.000	
133	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	551.000	
134	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	735.000	
135	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	1.537.000	
136	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	557.000	
137	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	897.000	
138	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	535.000	
139	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	941.000	
140	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	1.537.000	
141	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	647.000	
142	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	1.057.000	
143	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	492.000	
144	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.036.000	
145	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.665.000	
146	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	571.000	
147	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.042.000	
148	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	468.000	
149	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Bengkulu	1 Perkara	1.027.000	
150	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.505.000	
	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>			
151	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	920.000	
152	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten	1 Perkara	920.000	
153	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	920.000	
154	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	1 Perkara	920.000	
155	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	920.000	
156	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Barat	1 Perkara	920.000	
157	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	920.000	
158	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	920.000	
159	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	920.000	
160	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	920.000	
161	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	920.000	
162	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	920.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	163 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	1 Perkara	920.000	
	164 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	1 Perkara	920.000	
	165 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Palembang	1 Perkara	920.000	
	166 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	1 Perkara	920.000	
	167 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	750.000	
	168 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	760.000	
	169 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	760.000	
	170 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	800.000	
	171 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	760.000	
	172 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	920.000	
	173 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	790.000	
	174 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	920.000	
	175 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	1 Perkara	920.000	
	176 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Denpasar	1 Perkara	920.000	
	177 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	920.000	
	178 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	920.000	
	179 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	1 Perkara	920.000	
	180 Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	920.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	<b>Kejaksaan Republik Indonesia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah I	1 Lapdu	3.400.000	
	2 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I	1 Lapdu	7.300.000	
	3 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah II	1 Lapdu	3.400.000	
	4 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II	1 Lapdu	7.300.000	
	5 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah III	1 Lapdu	3.400.000	
	6 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III	1 Lapdu	7.300.000	
	7 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah IV	1 Lapdu	3.400.000	
	8 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV	1 Lapdu	7.300.000	
	9 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah V	1 Lapdu	3.400.000	
	10 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V	1 Lapdu	7.300.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Diklat Penanganan ABH Berdasarkan UU SPPA</b>			
	1 Diklat Terpadu Penanganan ABH Berdasarkan UU SPPA	1 Angkatan	377.249.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Literatur</b>			
	1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap	20 Literatur	909.450.000	
	<b>Modul</b>			
	2 Penyusunan Modul Fakultas Politik Pemerintahan	10 Modul	389.875.000	
	3 Penyusunan Modul Fakultas Manajemen Pemerintahan	10 Modul	389.875.000	
	4 Penyusunan Modul Pelatihan	10 Modul	306.675.000	
	<b>RPS/RTM</b>			
	5 Penyusunan RPS dan RTM Pengajaran Semester Ganjil dan Genap	15 RPS dan RTM	568.027.000	
	6 Penyusunan RPS dan RTM Pelatihan Semester Ganjil dan Genap	12 RPS dan RTM	236.720.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penilaian Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</b>			
	7 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	106.595.000	
	8 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	114.295.000	
	9 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Batch	132.477.000	
010.12	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi</b>			
	1 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.409.000	
	2 Diklat 6 Hari	1 Angkatan	87.272.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Pusat</b>			
	3 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.409.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan</b>			
	4 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.409.000	
	5 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	144.244.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Teknis</b>			
	6 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.409.000	
	7 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	144.244.000	
	8 Diklat 14 Hari	1 Angkatan	170.144.000	
	9 Diklat 35 Hari	1 Angkatan	363.314.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional</b>			
	10 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.409.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	<b>Kementerian Pertahanan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	5.774.788	
	2 Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	7.517.566	
	3 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.298.277	
	4 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tingkat Muda Pertahanan	1 Lulusan	5.758.122	
	5 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Lulusan	6.365.833	
	6 Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.416.666	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Pertahanan</b>			
	7 Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan	1 Lulusan	5.598.000	
	8 Kursus Manajemen Pengeluaran BMN	1 Lulusan	5.217.416	
	<b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III</b>			
	9 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Lulusan	5.276.000	
	<b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat</b>			
	10 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.276.000	
	<b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan Jabatan Setingkat</b>			
	11 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.276.000	
	<b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat</b>			
	12 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.408.000	
	<b>Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS</b>			
	13 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Lulusan	5.276.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	14 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	27.533.000	
	15 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	31.517.000	
	16 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	34.364.000	
	17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	28.671.000	
	18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	114.810.000	
	19 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.138.000	
	20 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	8.862.000	
	21 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.380.000	
	22 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.062.000	
	23 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	24.021.000	
	24 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.636.000	
	25 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	14.929.000	
	26 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	15.913.000	
	27 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.567.000	
	28 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	38.494.000	
	29 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.540.000	
	30 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	12.316.000	
	31 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	12.885.000	
	32 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	11.902.000	
	33 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	27.694.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
34	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	25.538.000	
35	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	29.885.000	
36	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	32.990.000	
37	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	26.780.000	
38	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	120.742.000	
39	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	9.390.000	
40	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	11.201.000	
41	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	12.495.000	
42	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	9.908.000	
43	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	49.047.000	
44	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	14.257.000	
45	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	16.275.000	
46	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	17.776.000	
47	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	15.395.000	
48	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	54.798.000	
49	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	14.307.000	
50	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	17.205.000	
51	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	19.275.000	
52	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	15.135.000	
53	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	77.762.000	
54	Pendapat dan Saran Hukum ( <i>Legal Opinion</i> )	1 Laporan	875.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian</b>			
55	Kursus Intensif Bahasa Asing Non Inggris Pasukan Perdamaian	1 Lulusan	5.364.000	
56	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Perdamaian PBB	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah</b>			
57	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar</b>			
58	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk.Dasar ke-16	1 Lulusan	6.964.000	
59	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk.Dasar ke-17	1 Lulusan	6.964.000	
60	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk.Dasar ke-18	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris</b>			
61	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris</b>			
62	Kursus Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	1 Lulusan	5.364.000	
63	KIBI Persiapan TOEFL dan KIBI Persiapan IELTS	1 Lulusan	5.364.000	
64	KIBI Penerjemah Tulis dan KIBI <i>Executive</i>	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Tk. Menengah</b>			
65	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tingkat Menengah	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Perwira SAF</b>			
66	Kursus Intensif Bahasa Indonesia bagi Perwira SAF	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Asing (Non Inggris)</b>			
67	Kursus Intensif Bahasa Arab, Mandarin, Korea, Rusia, dan Perancis	1 Lulusan	5.364.000	
68	Kursus Intensif Bahasa Jepang dan Jerman	1 Lulusan	5.364.000	
012.21	<b>Markas Besar TNI</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI</b>			
1	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Orang	270.220	
2	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Orang	272.220	
3	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Orang	271.220	
4	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Orang	275.220	
5	Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Orang	278.220	
6	Rahwan Rayon I	1 Orang	300.268	
7	Rahwan Rayon II	1 Orang	302.268	
8	Rahwan Rayon III	1 Orang	301.268	
9	Rahwan Rayon IV	1 Orang	305.268	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
10	Rahwan Rayon V <b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI</b>	1 Orang	308.268	
11	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI <b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Strategis TNI</b>	1 Orang	352.568	
12	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Strategis TNI <b>Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia</b>	1 Orang	456.255	
13	Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.240.900	
14	Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	8.919.376	
15	Seleksi Satgas <i>Force Protection Company</i> (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	1.603.900	
16	Kegiatan Satgas <i>Force Protection Company</i> (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	9.622.180	
17	Seleksi Satgas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.240.666	
18	Kegiatan Satgas <i>Military Police Unit</i> (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	11.477.760	
19	Seleksi Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.759.200	
20	Kegiatan Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	13.540.600	
21	Seleksi Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.941.166	
22	Kegiatan Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	20.172.111	
23	Seleksi Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	5.012.000	
24	Kegiatan Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	35.663.428	
25	Seleksi Satgas Level II <i>Hospital</i> TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	4.229.222	
26	Kegiatan Satgas Level II <i>Hospital</i> TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	28.924.333	
27	Seleksi Satgas <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	5.194.219	
28	Kegiatan Satgas <i>Maritime Task Force</i> (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	12.049.224	
29	Seleksi Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1 Kegiatan	2.216.367	
30	Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1 Kegiatan	8.527.056	
31	Seleksi Satgas Yon Komposit TNI KONGA MONUSCO CONGO	1 Kegiatan	2.206.062	
32	Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA MONUSCO CONGO	1 Kegiatan	7.955.337	
33	Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA MONUSCO CONGO	1 Kegiatan	3.502.117	
34	Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA MONUSCO CONGO	1 Kegiatan	11.548.228	
35	Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA <i>Central African Republic</i>	1 Kegiatan	3.162.757	
36	Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA <i>Central African Republic</i>	1 Kegiatan	9.694.405	
37	Seleksi Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1 Kegiatan	1.766.183	
38	Kegiatan Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1 Kegiatan	9.873.560	
39	Seleksi Satgas IMT Filipina	1 Kegiatan	1.911.083	
40	Kegiatan Satgas IMT Filipina <b>Peserta Operasi Rutin Integratif</b>	1 Kegiatan	504.992.500	
41	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Orang	72.988	
42	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Orang	76.988	
43	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Orang	75.988	
44	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Orang	77.988	
45	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V <b>Peserta Operasi Intelijen Rutin</b>	1 Orang	79.988	
46	Rayon I	1 Orang	161.148	
47	Rayon II	1 Orang	164.148	
48	Rayon III	1 Orang	170.148	
49	Rayon IV	1 Orang	171.148	
50	Rayon V <b>Peserta Operasi Teritorial Integratif</b>	1 Orang	179.148	
51	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 orang	123.380	
52	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 orang	129.380	
53	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 orang	128.380	
54	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 orang	133.380	
55	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 orang	136.380	
56	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Terpusat	1 orang	225.476	
57	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon I	1 orang	238.400	
58	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon II	1 orang	244.400	
59	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon III	1 orang	243.400	
60	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon IV	1 orang	248.400	
61	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon V	1 orang	251.400	
62	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Opster Rayon I	1 orang	105.607	
63	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Opster Rayon II	1 orang	111.607	
64	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Opster Rayon III	1 orang	110.607	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
65	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Opster Rayon IV	1 orang	115.607	
66	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Opster Rayon V	1 orang	118.607	
67	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon I	1 orang	98.728	
68	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon II	1 orang	104.728	
69	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon III	1 orang	103.728	
70	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon IV	1 orang	108.728	
71	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon V	1 orang	111.728	
72	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 orang	176.433	
	<b>Calon Perwira Karier (PA PK)</b>			
73	Calon PA PK TNI	1 Orang	17.657.575	
	<b>Lulusan Dikma Candradimuka Capratar</b>			
74	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	14.484.266	
75	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	16.796.280	
	<b>Lulusan Dikma Candradimuka Pratar</b>			
76	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	4.795.633	
	<b>Lulusan Diklan PSDP Penerbang</b>			
77	Lulusan Diklanjutan PSDP Penerbang TNI	1 Orang	11.819.248	
	<b>Lulusan Dikma PA PK Pria</b>			
78	Lulusan Dikma PA PK Pria Reguler dan Kesehatan TNI	1 Orang	11.175.875	
	<b>Lulusan Dikma PA PK Wanita</b>			
79	Lulusan Dikma PA PK Wanita Reguler dan Kesehatan TNI	1 Orang	11.690.603	
	<b>Peserta Sesko TNI</b>			
80	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	5.502.153	
	<b>Lulusan Sesko TNI</b>			
81	lulusan Sesko TNI	1 Orang	6.355.210	
	<b>Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi TNI</b>			
82	Lulusan Dik Suspa TNI	1 Orang	4.579.833	
83	Lulusan Dik Susba TNI	1 Orang	3.996.666	
84	Lulusan Dik SIP TNI	1 Orang	13.724.433	
85	Lulusan Susjab Kimil	1 Orang	4.695.666	
86	Lulusan Susjab Ormil TNI	1 Orang	4.683.538	
87	Lulusan Susgati Bintai	1 Orang	4.685.400	
88	Kursus Perwira Dasar Intelijen TNI	1 Orang	4.683.833	
89	Kursus Perwira Kontra Intelijen TNI	1 Orang	4.896.893	
90	Kursus Perwira Intelijen Strategis Tk. I	1 Orang	4.621.066	
91	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen TNI	1 Orang	4.351.448	
92	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen TNI	1 Orang	4.121.590	
93	Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI	1 Orang	4.170.858	
94	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	159.308	
95	Penataran/Latihan Pa Bangspes	1 Orang	159.308	
96	Penataran/Latihan Ba Bangspes	1 Orang	156.808	
97	Penataran/Latihan Ta Bangspes	1 Orang	154.308	
98	Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.055.733	
99	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.005.693	
100	Kursus Perwira Litpers	1 Orang	5.056.733	
101	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	4.911.411	
102	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial TNI	1 Orang	4.149.977	
103	Lulusan Sekbang Terpadu	1 Orang	9.492.483	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
104	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.287.060	
	<b>Peserta Latihan Internasional di Dalam Negeri</b>			
105	Peserta Latihan Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	119.072	
	<b>Latihan Kesiapsiagaan Operasi</b>			
106	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah I	1 Orang	139.326	
107	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah II	1 Orang	139.926	
108	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah III	1 Orang	140.526	
109	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah IV	1 Orang	141.126	
110	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah V	1 Orang	141.726	
	<b>Latihan Pembinaan Balakpus TNI</b>			
111	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	162.956	
112	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.159	
	<b>Latihan Pratugas Operasi</b>			
113	Peserta Latihan Pratugas Pamtas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	105.524	
114	Peserta Latihan Pratugas Pamtas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.053	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	115 Peserta Latihan Pratugas Pamtas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.224	
	116 Peserta Latihan Pratugas Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.395	
	117 Peserta Latihan Pratugas Pamtas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	126.424	
	118 Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah I)	1 Orang	100.843	
	119 Peserta Latihan Pratugas Operasi PAM Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	103.127	
	120 Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	164.759	
	<b>Layanan Operasional Pertahanan</b>			
	121 Pendapat dan Saran Hukum	1 Layanan	875.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
	122 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	21.276.000	
	123 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.120.000	
	<b>Pengurusan Tahanan</b>			
	124 Pengurusan Tahanan Sementara	1 Orang	45.870	
	125 Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan	1 Orang	43.379	
	<b>Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer</b>			
	126 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	41.880.000	
	127 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	46.589.000	
	128 Penuntutan dan Pengolahan perkara pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	49.953.000	
	129 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	43.325.000	
	130 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer Rayon 5	1 Perkara	140.774.000	
	131 Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer di Otmilti Rayon 1	1 Perkara	91.610.000	
	132 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1 Perkara	110.360.000	
	133 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1 Perkara	129.110.000	
	134 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1 Perkara	129.110.000	
	135 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1 Perkara	172.910.000	
	136 Penuntutan dan pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	1.441.000	
	137 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	3.655.000	
	138 Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	4.260.000	
	139 Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	4.693.000	
	140 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	3.829.000	
	141 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	16.351.000	
	142 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara	1 Perkara	1.845.000	
	143 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.022.000	
	144 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.097.000	
	145 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.151.000	
	146 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.022.000	
	147 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.610.000	
	148 Petunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	7.502.000	
	<b>Laporan Pembinaan Napi</b>			
	149 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Perkara	122.333	
	150 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Perkara	125.555	
	151 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Perkara	127.855	
	152 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Perkara	123.255	
	153 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Perkara	184.944	
	154 Juknis Pembinaan Napi Prajurit TNI	1 Perkara	2.352.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
	155 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I Rayon 1	1 Perkara	6.237.000	
	156 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Perkara	6.682.000	
	157 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Perkara	7.003.000	
	158 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Perkara	6.382.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	159 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Perkara	15.696.000	
	160 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.387.000	
	161 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.387.000	
	162 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	2.812.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
	163 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I Rayon 1	1 Perkara	12.752.000	
	164 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	14.582.000	
	165 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	15.852.000	
	166 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	13.274.000	
	167 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Perkara	50.847.000	
	168 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.	1 Perkara	4.416.000	
	169 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. Kasasi	1 Perkara	3.389.000	
	170 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. PK	1 Perkara	6.116.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	171 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat	1 Perkara	27.533.000	
	172 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 2	1 Perkara	31.517.000	
	173 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 3	1 Perkara	34.364.000	
	174 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	28.671.000	
	175 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	114.810.000	
	176 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.138.000	
	177 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	8.862.000	
	178 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	9.380.000	
	179 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.345.000	
	180 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	24.021.000	
	181 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	13.636.000	
	182 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	14.929.000	
	183 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	15.913.000	
	184 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	14.567.000	
	185 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	38.494.000	
	186 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	11.540.000	
	187 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	12.316.000	
	188 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	12.885.000	
	189 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	11.902.000	
	190 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	27.694.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
	191 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TKI Rayon 1	1 Perkara	25.538.000	
	192 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	29.885.000	
	193 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	32.990.000	
	194 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	26.780.000	
	195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	120.742.000	
	196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	9.390.000	
	197 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	11.201.000	
	198 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	12.495.000	
	199 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	9.908.000	
	200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	49.047.000	
	201 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.257.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	202 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	16.275.000	
	203 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.776.000	
	204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.395.000	
	205 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	54.798.000	
	206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	14.307.000	
	207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	17.205.000	
	208 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	19.275.000	
	209 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	15.135.000	
	210 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	77.762.000	
<b>012.22</b>	<b>Markas Besar TNI AD</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Latihan Kematraan</b>			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS)	1 Orang Hari	1.500.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS)	1 Orang Hari	2.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS)	1 Orang Hari	2.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS)	1 Orang Hari	3.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS)	1 Orang Hari	3.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Detasemen)	1 Orang Hari	3.500.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Detasemen)	1 Orang Hari	4.000.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Detasemen)	1 Orang Hari	4.500.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Detasemen)	1 Orang Hari	5.000.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Detasemen)	1 Orang Hari	5.500.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Batalyon Terpusat)	1 Orang Hari	5.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Batalyon Terpusat)	1 Orang Hari	5.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Batalyon Terpusat)	1 Orang Hari	6.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Batalyon Terpusat)	1 Orang Hari	6.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang Hari	7.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Batalyon Tersebar)	1 Orang Hari	6.000.000	
	17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Batalyon Tersebar)	1 Orang Hari	6.500.000	
	18 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Batalyon Tersebar)	1 Orang Hari	7.000.000	
	19 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Batalyon Tersebar)	1 Orang Hari	7.500.000	
	20 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang Hari	8.000.000	
	21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang Hari	7.000.000	
	22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang Hari	7.500.000	
	23 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang Hari	8.000.000	
	24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang Hari	8.500.000	
	25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang Hari	9.000.000	
	26 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam, dan Balak Aju)	1 Orang Hari	4.000.000	
	27 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam, dan Balak Aju)	1 Orang Hari	4.500.000	
	28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam, dan Balak Aju)	1 Orang Hari	5.000.000	
	29 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam, dan Balak Aju)	1 Orang Hari	5.500.000	
	30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam, dan Balak Aju)	1 Orang Hari	6.000.000	
	31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Teritorial Materi Latarsar Ter)	1 Orang Hari	3.500.000	
	32 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Teritorial Materi Latarsar Ter)	1 Orang Hari	4.000.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
33	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Teritorial Materi Latorsar Ter)	1 Orang Hari	4.500.000	
34	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Teritorial Materi Latorsar Ter)	1 Orang Hari	5.000.000	
35	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Teritorial Materi Latorsar Ter)	1 Orang Hari	5.500.000	
36	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Teritorial Materi Latorsar Intel)	1 Orang Hari	1.000.000	
37	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Teritorial Materi Latorsar Intel)	1 Orang Hari	1.500.000	
38	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Teritorial Materi Latorsar Intel)	1 Orang Hari	2.000.000	
39	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Teritorial Materi Latorsar Intel)	1 Orang Hari	2.500.000	
40	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Teritorial Materi Latorsar Intel)	1 Orang Hari	3.000.000	
	<b>Lulusan Dikma Koptar</b>			
41	Kopral Taruna Pria	1 OB	4.465.833	
42	Kopral Taruna Wanita	1 OB	4.465.833	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
43	Sersan Taruna Pria	1 OB	4.875.833	
44	Sersan Taruna Wanita	1 OB	4.875.833	
	<b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>			
45	Sermadatar Pria	1 OB	5.070.833	
46	Sermadatar Wanita	1 OB	5.070.833	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
47	Sermatutar Pria	1 OB	5.500.833	
48	Sermatutar Wanita	1 OB	5.500.833	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat</b>			
49	Secaba Pria Rayon I	1 OB	3.393.000	
50	Secaba Pria Rayon II	1 OB	3.453.000	
51	Secaba Pria Rayon III	1 OB	3.603.000	
52	Secaba Pria Rayon IV	1 OB	3.633.000	
53	Secaba Pria Rayon V	1 OB	3.813.000	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat</b>			
54	Secaba Wanita	1 OB	3.393.000	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Darat</b>			
55	Secata Rayon I	1 OB	3.159.000	
56	Secata Rayon II	1 OB	3.219.000	
57	Secata Rayon III	1 OB	3.369.000	
58	Secata Rayon IV	1 OB	3.399.000	
59	Secata Rayon V	1 OB	3.579.000	
60	Pra Dikma Secata	1 OB	3.441.000	
	<b>Calon Taruna Matra Darat</b>			
61	Werving Taruna Matra Darat Umum	1 OB	24.957.377	
	<b>Calon Bintara Matra Darat</b>			
62	Werving Bintara Umum Matra Darat	1 OB	6.238.910	
63	Werving Bintara Sumber Pulau/Perbatasan/ Pedalaman Matra Darat	1 OB	15.853.580	
	<b>Calon Bintara Matra Darat</b>			
64	Werving Bintara Umum Matra Darat	1 OB	4.517.415	
65	Werving Bintara Sumber Pulau Terluar/Perbatasan/ Pedalaman Matra Darat	1 OB	14.157.114	
	<b>Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat</b>			
66	Satpur/Banpur	1 OB	5.364.000	
67	Banmin	1 OB	4.914.000	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat</b>			
68	Rayon I	1 OB	3.125.500	
69	Rayon II	1 OB	3.185.500	
70	Rayon III	1 OB	3.330.500	
71	Rayon IV	1 OB	3.360.500	
72	Rayon V	1 OB	3.545.500	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat</b>			
73	Rayon I	1 OB	2.952.666	
74	Rayon II	1 OB	3.012.666	
75	Rayon III	1 OB	3.150.166	
76	Rayon IV	1 OB	3.182.666	
77	Rayon V	1 OB	3.295.166	
	<b>Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat</b>			
78	Diktukpa Matra Darat	1 OB	3.712.214	
	<b>Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat</b>			
79	Rayon I	1 OB	3.394.111	
80	Rayon II	1 OB	3.454.111	
81	Rayon III	1 OB	3.564.111	
82	Rayon IV	1 OB	3.624.111	
83	Rayon V	1 OB	3.784.111	
	<b>Peserta Secapareg Matra Darat</b>			
84	Rayon I	1 OB	1.629.100	
85	Rayon II	1 OB	1.677.700	
86	Rayon III	1 OB	1.679.200	
87	Rayon IV	1 OB	1.688.500	
88	Rayon V	1 OB	1.689.300	
	<b>Peserta Secabareg Matra Darat</b>			
89	Rayon I	1 OB	1.256.600	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
90	Rayon II	1 OB	1.267.700	
91	Rayon III	1 OB	1.299.200	
92	Rayon IV	1 OB	1.313.500	
93	Rayon V	1 OB	1.349.300	
	<b>Lulusan Diksargolan Secapa</b>			
94	Satpur/Banpur	1 OB	4.598.000	
95	Banmin	1 OB	4.318.000	
	<b>Lulusan Seskoad</b>			
96	Lulusan Seskoad	1 OB	4.695.818	
	<b>Lulusan Selapa Matra Darat</b>			
97	Satpur/Banpur	1 OB	3.826.500	
98	Banmin	1 OB	3.601.500	
	<b>Peserta Seskoad</b>			
99	Rayon I	1 OB	6.116.000	
100	Rayon II	1 OB	6.139.000	
101	Rayon III	1 OB	6.204.000	
102	Rayon IV	1 OB	6.193.000	
103	Rayon V	1 OB	6.278.000	
	<b>Peserta Selapa Matra Darat</b>			
104	Rayon I	1 OB	4.084.000	
105	Rayon II	1 OB	4.054.500	
106	Rayon III	1 OB	4.175.000	
107	Rayon IV	1 OB	4.228.500	
108	Rayon V	1 OB	4.261.000	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat</b>			
109	Satpur/Banpur	1 OB	3.583.500	
110	Banmin	1 OB	3.433.500	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat</b>			
111	Rayon I	1 OB	2.976.500	
112	Rayon II	1 OB	3.036.500	
113	Rayon III	1 OB	3.186.500	
114	Rayon IV	1 OB	3.216.500	
115	Rayon V	1 OB	3.396.500	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat</b>			
116	Rayon I	1 OB	2.859.250	
117	Rayon II	1 OB	2.919.250	
118	Rayon III	1 OB	3.044.250	
119	Rayon IV	1 OB	3.079.250	
120	Rayon V	1 OB	3.279.250	
	<b>Peserta Dikbangspes Matra Darat</b>			
121	Rayon I	1 OB	1.183.400	
122	Rayon II	1 OB	1.241.800	
123	Rayon III	1 OB	1.242.800	
124	Rayon IV	1 OB	1.247.000	
125	Rayon V	1 OB	1.282.200	
	<b>Lulusan Pendidikan Keahlian</b>			
126	Rayon I	1 OB	3.648.500	
127	Rayon II	1 OB	3.708.500	
128	Rayon III	1 OB	3.808.500	
129	Rayon IV	1 OB	3.838.500	
130	Rayon V	1 OB	4.018.500	
	<b>Lulusan Dik Iptek</b>			
131	DIK Iptek S-1	1 OB	3.551.833	
132	DIK Iptek D-3 (RAYON I)	1 OB	2.978.166	
133	DIK Iptek D-3 (RAYON II)	1 OB	3.038.166	
134	DIK Iptek D-3 (RAYON III)	1 OB	3.188.166	
135	DIK Iptek D-3 (RAYON IV)	1 OB	3.218.166	
136	DIK Iptek D-3 (RAYON V)	1 OB	3.398.166	
137	DIK Iptek SMK (RAYON I)	1 OB	2.910.083	
138	DIK Iptek SMK (RAYON II)	1 OB	2.970.083	
139	DIK Iptek SMK (RAYON III)	1 OB	3.120.083	
140	DIK Iptek SMK (RAYON IV)	1 OB	3.150.083	
141	DIK Iptek SMK (RAYON V)	1 OB	3.330.083	
142	DIK Iptek D4	1 OB	3.491.833	
	<b>Peserta Dik Profesi dan Keahlian</b>			
143	Rayon I	1 OB	1.814.400	
144	Rayon II	1 OB	1.827.800	
145	Rayon III	1 OB	1.852.800	
146	Rayon IV	1 OB	1.857.000	
147	Rayon V	1 OB	1.872.200	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
148	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Laporan	8.572.000	
149	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Laporan	9.160.000	
150	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Laporan	9.581.000	
151	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Laporan	8.746.000	
152	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Laporan	21.276.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
153	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Laporan	2.120.000	
154	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Laporan	2.260.000	
155	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Laporan	2.360.000	
156	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Laporan	2.160.000	
157	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Laporan	5.180.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
158	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Laporan	45.870	
159	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Laporan	46.970	
160	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Laporan	52.045	
161	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Laporan	46.985	
162	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Laporan	60.200	
163	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Laporan	43.379	
164	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Laporan	44.534	
165	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Laporan	49.568	
166	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Laporan	45.724	
167	Pengurusan Tahanan dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Laporan	56.724	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana</b>			
168	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Laporan	6.237.000	
169	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Laporan	6.682.000	
170	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Laporan	7.003.000	
171	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Laporan	6.382.000	
172	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Laporan	15.696.000	
173	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.387.000	
174	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.387.000	
175	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.812.000	
176	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Laporan	875.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
177	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Laporan	12.752.000	
178	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Laporan	14.582.000	
179	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Laporan	15.852.000	
180	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Laporan	13.274.000	
181	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Laporan	50.847.000	
182	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.416.000	
183	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.389.000	
184	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.116.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Peggugat</b>			
185	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Peggugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	27.533.000	
186	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Peggugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	31.517.000	
187	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Peggugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	34.364.000	
188	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Peggugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	28.671.000	
189	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Peggugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	114.810.000	
190	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	8.138.000	
191	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	8.862.000	
192	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	9.380.000	
193	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	8.345.000	
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	24.021.000	
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	13.636.000	
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	14.929.000	
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	15.913.000	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	14.567.000	
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	38.494.000	
200	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	11.540.000	
201	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	12.316.000	
202	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	12.885.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	203 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	11.902.000	
	204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	27.694.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Tergugat</b>			
	205 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	25.538.000	
	206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	29.885.000	
	207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	32.990.000	
	208 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	26.780.000	
	209 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	120.742.000	
	210 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	9.390.000	
	211 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	11.201.000	
	212 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	12.495.000	
	213 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	9.908.000	
	214 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	49.047.000	
	215 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	14.257.000	
	216 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	16.275.000	
	217 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	17.776.000	
	218 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	15.395.000	
	219 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	54.798.000	
	220 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	14.307.000	
	221 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	17.205.000	
	222 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	19.275.000	
	223 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	15.135.000	
	224 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	77.762.000	
	225 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Laporan	875.000	
<b>012.23</b>	<b>Markas Besar TNI AL</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Taktis TNI</b>			
	1 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI, Calon Kadet	1 Orang	411.000	
	2 Calon Kadet	1 Orang	24.876.500	
	<b>Calon Bintara Matra Laut</b>			
	3 Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.219.000	
	<b>Calon Tamtama Matra Laut</b>			
	4 Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.503.400	
	<b>Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL</b>			
	5 Latihan Kematraan	1 Orang	87.700	
	6 Latihan Satuan	1 Orang	81.000	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	7 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	453.800	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
	8 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	116.100	
	<b>Peserta Latihan Marinir</b>			
	9 Latihan Satuan	1 Orang	85.000	
	10 Latihan Satuan Kecil	1 Orang	79.000	
	11 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	118.900	
	<b>Peserta Diklapa</b>			
	12 Peserta Diklapa	1 Orang	3.819.820	
	<b>Peserta Diktukpa</b>			
	13 Peserta Diktukpa	1 Orang	3.047.690	
	<b>Peserta Diktukba</b>			
	14 Peserta Diktukba	1 Orang	3.447.860	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikma Kopta</b>			
15	Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.751.650	
16	Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.751.650	
	<b>Lulusan Dikma Serkad</b>			
17	Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.441.083	
18	Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.441.083	
	<b>Lulusan Dikma Sermadakad</b>			
19	Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.717.766	
20	Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.717.766	
	<b>Lulusan Dikma Sermatukad</b>			
21	Dikma Sermatukar Pria	1 Orang	7.052.766	
22	Dikma Sermatukar Wanita	1 Orang	7.052.766	
	<b>Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut</b>			
23	Diksargolan Perwira Pa PK Matra Laut	1 Orang	5.076.308	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut</b>			
24	Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.882.883	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut</b>			
25	Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.882.883	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut</b>			
26	Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.583.958	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Laut</b>			
27	Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.470.316	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut</b>			
28	Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.274.233	
	<b>Lulusan Dik Seskoal</b>			
29	Dik Seskoal	1 Orang	5.591.270	
	<b>Lulusan Diklapa</b>			
30	Diklapa Matra Laut	1 Orang	3.946.566	
	<b>Lulusan Diktukpa</b>			
31	Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.700.709	
	<b>Lulusan Diktukba</b>			
32	Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.516.743	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS Sederajat Matra Laut</b>			
33	Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.009.857	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS Sederajat Matra Laut</b>			
34	Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.494.100	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut</b>			
35	Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.257.933	
	<b>Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut</b>			
36	Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.158.075	
	<b>Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut</b>			
37	Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.613.191	
	<b>Lulusan Diksus Brevet Matra Laut</b>			
38	Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.542.800	
	<b>Lulusan Dik Lainnya</b>			
39	Dik STTAL D-3	1 Orang	3.371.583	
40	Dik STTAL S-1	1 Orang	3.709.180	
41	Dik STTAL S-2	1 Orang	4.104.402	
	<b>Peserta Kursus Manajemen Strategik</b>			
42	Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.648.260	
43	Peserta Seskoal	1 Orang	4.928.860	
	<b>Peserta STTAL</b>			
44	Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.627.060	
45	Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.772.260	
46	Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.842.660	
	<b>Peserta Dikspespa</b>			
47	Peserta Dikspespa	1 Orang	2.677.860	
	<b>Peserta Dikspesba</b>			
48	Peserta Dikspesba	1 Orang	2.588.460	
	<b>Peserta Dik Brevet</b>			
49	Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.199.860	
	<b>Peserta Penerbang TNI AL</b>			
50	Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	4.239.550	
	<b>Peserta Dikspesta</b>			
51	Peserta Dikspesta	1 Orang	2.300.000	
	<b>Laporan Pembinaan Hukum</b>			
52	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	48.364.000	
53	Pendapat dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	875.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Ravon 1	1 Laporan	6.237.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Ravon 2	1 Laporan	6.682.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Ravon 3	1 Laporan	7.003.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Ravon 4	1 Laporan	6.382.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Ravon 5	1 Laporan	15.696.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.387.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.387.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.812.000	
62	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Laporan	875.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	12.752.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	14.582.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	15.852.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	13.274.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	50.847.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.416.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.389.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	6.116.000	
71	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Laporan	875.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	27.533.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	31.517.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	34.364.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	28.671.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	114.810.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	8.138.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	8.862.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.380.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.345.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	24.021.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.636.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	14.929.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	15.913.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.567.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	38.494.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.540.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	12.316.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	128.885.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	11.902.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	27.694.000	
92	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Penggugat	1 Laporan	875.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	25.538.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	29.885.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	32.990.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	26.780.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	120.742.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.390.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	11.201.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.495.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	9.908.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	49.047.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	14.257.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	16.275.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	17.776.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	15.395.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	54.798.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	14.307.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	17.205.000	
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	19.275.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	15.135.000	
	112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	77.762.000	
	113 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/TUN Tergugat	1 Laporan	875.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
	114 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Laporan	8.572.000	
	115 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Laporan	9.160.000	
	116 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Laporan	9.581.000	
	117 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Laporan	8.746.000	
	118 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Laporan	21.276.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
	119 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Laporan	2.120.000	
	120 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Laporan	2.260.000	
	121 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Laporan	2.360.000	
	122 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Laporan	2.160.000	
	123 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Laporan	5.180.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
	124 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Laporan	45.870	
	125 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Laporan	46.970	
	126 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Laporan	52.045	
	127 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Laporan	46.895	
	128 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Laporan	60.200	
012.24	<b>Markas Besar TNI AU</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Calon Karbol	1 orang	24.947.965	
	2 Calon Bintara Matra Udara	1 orang	6.236.770	
	3 Calon Tamtama Matra Udara	1 orang	4.516.380	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Operasi Militer Selain Perang Matra Udara</b>			
	4 Operasi Bhakti TNI	1 Kegiatan	101.470	
	<b>Intelijen dan Pengamanan Matra Udara</b>			
	5 Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Kegiatan	336.407	
	<b>Peserta Latihan Kematraan</b>			
	6 Peserta Latihan Kematraan	1 Kegiatan	83.800	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	7 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Kegiatan	7.124.205	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
	8 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Kegiatan	164.208	
	<b>Peserta Sesko Matra Udara</b>			
	9 Seleksi Seskoau dan Sessau Matra Udara	1 orang	2.489.700	
	<b>Peserta Sekkau</b>			
	10 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 orang	1.702.200	
	<b>Peserta Setukpa</b>			
	11 Seleksi Setukpa Matra udara	1 orang	1.544.620	
	<b>Peserta Setukba</b>			
	12 Seleksi Setukba Matra Udara	1 orang	1.329.420	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
	13 Pendidikan Sertar Pria	1 orang	5.860.750	
	14 Pendidikan Sertar Wanita	1 orang	5.860.750	
	<b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>			
	15 Pendidikan Sermadatar Pria	1 orang	6.084.683	
	16 Pendidikan Sermadatar Wanita	1 orang	6.084.683	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
	17 Pendidikan Sermatutar Pria	1 orang	6.458.591	
	18 Pendidikan Sermatutar Wanita	1 orang	6.458.591	
	<b>Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara</b>			
	19 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 orang	5.345.376	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara</b>			
	20 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 orang	3.157.110	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara</b>			
	21 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 orang	3.156.530	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara</b>			
	22 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 orang	3.205.941	
	23 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 orang	3.205.941	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Udara</b>			
	24 Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 orang	2.849.860	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara</b>			
	25 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 orang	2.925.908	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikma Sekbang/Seknav</b>			
26	Pendidikan Sekbang/Seknav	1 orang	6.870.258	
	<b>Lulusan Dikma SIN/SIP</b>			
27	Pendidikan SIP/SIN Matra Udara	1 orang	6.746.483	
	<b>Lulusan Seskoau</b>			
28	Pendidikan Seskoau	1 orang	4.927.554	
29	Pendidikan Sesau	1 orang	4.813.300	
	<b>Lulusan Sekkau</b>			
30	Pendidikan Sekkau	1 orang	3.765.916	
31	Pendidikan Suspajemen	1 orang	3.728.350	
	<b>Lulusan Setukpa</b>			
32	Pendidikan Setukpa	1 orang	3.541.593	
	<b>Lulusan Setukba</b>			
33	Pendidikan Setukba	1 orang	3.299.050	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara</b>			
34	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 orang	3.509.541	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara</b>			
35	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 orang	2.950.341	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara</b>			
36	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 orang	2.845.266	
	<b>Peserta Dikbangspes Perwira</b>			
37	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 orang	790.060	
	<b>Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama</b>			
38	Seleksi Dikbangspes Bintara/Tamtama Matra Udara	1 orang	680.460	
	<b>Lulusan Dikma Koptar</b>			
39	Pendidikan Koptar Pria	1 orang	4.986.016	
40	Pendidikan Koptar Wanita	1 orang	4.986.016	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
41	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	8.572.000	
42	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	9.160.000	
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	9.581.000	
44	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	8.746.000	
45	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	21.276.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
46	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	2.120.000	
47	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	2.260.000	
48	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	2.360.000	
49	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	2.160.000	
50	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	5.180.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
51	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Kegiatan	45.870	
52	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Kegiatan	46.970	
53	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Kegiatan	52.045	
54	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Kegiatan	46.895	
55	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Kegiatan	60.200	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	6.237.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	6.682.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	7.003.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	6.382.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	15.696.000	
61	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara pidana militer Tk. Banding	1 Kegiatan	2.387.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Kegiatan	2.387.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Kegiatan	2.812.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	12.752.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	14.582.000	
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	15.852.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	13.274.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	50.847.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Kegiatan	4.416.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Kegiatan	3.389.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Kegiatan	6.116.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	27.533.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	31.517.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	34.364.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	28.671.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	114.810.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Kegiatan	8.138.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Kegiatan	8.862.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Kegiatan	9.380.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Kegiatan	8.345.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Kegiatan	24.021.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	13.636.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	14.929.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	15.913.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	14.567.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	38.494.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Kegiatan	11.540.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Kegiatan	12.316.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Kegiatan	12.885.000	
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Kegiatan	11.902.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Kegiatan	27.694.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	25.538.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	29.885.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	32.990.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	26.780.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	120.742.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Kegiatan	9.390.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Kegiatan	11.201.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Kegiatan	12.495.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Kegiatan	9.908.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Kegiatan	49.047.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	14.257.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	16.275.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	17.776.000	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	15.395.000	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	54.798.000	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Kegiatan	14.307.000	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Kegiatan	17.205.000	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Kegiatan	19.275.000	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Kegiatan	15.135.000	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Kegiatan	77.762.000	
	<b>Pendapat dan Saran Hukum</b>			
112	Pendapat dan Saran Hukum Pidana	1 Perkara	875.000	
113	Pendapat dan Saran Hukum Perdata	1 Perkara	875.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pembinaan UPT Pemasyarakatan</b>			
	1 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah DKI Jakarta	19 UPT	372.006.000	
	2 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat	40 UPT	838.248.000	
	3 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah	58 UPT	1.100.260.000	
	4 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur	52 UPT	1.089.517.000	
	5 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Yogyakarta	15 UPT	713.476.000	
	6 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bali	14 UPT	768.568.000	
	7 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Banten	13 UPT	588.480.000	
	8 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Aceh	28 UPT	739.508.000	
	9 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara	42 UPT	928.280.000	
	10 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Barat	26 UPT	690.536.000	
	11 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Jambi	14 UPT	650.682.000	
	12 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Riau	20 UPT	626.064.000	
	13 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu	10 UPT	525.776.000	
	14 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Selatan	24 UPT	647.228.000	
	15 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Lampung	21 UPT	537.830.000	
	16 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bangka Belitung	9 UPT	504.432.000	
	17 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kepulauan Riau	12 UPT	610.732.000	
	18 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Barat	18 UPT	576.568.000	
	19 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Tengah	16 UPT	557.438.000	
	20 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Selatan	17 UPT	577.874.000	
	21 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Timur	16 UPT	688.462.000	
	22 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Maluku	17 UPT	760.716.000	
	23 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Maluku Utara	12 UPT	722.504.000	
	24 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Papua	14 UPT	1.163.880.000	
	25 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Papua Barat	11 UPT	993.096.000	
	26 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Utara	16 UPT	608.637.000	
	27 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Tengah	15 UPT	773.862.000	
	28 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara	11 UPT	614.340.000	
	29 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	28 UPT	805.852.000	
	30 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Barat	8 UPT	597.044.000	
	31 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah Gorontalo	7 UPT	558.584.000	
	32 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTB	13 UPT	641.586.000	
	33 Pembinaan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTT	21 UPT	674.076.000	
	<b>Layanan Pembinaan Narapidana</b>			
	34 Pembinaan Kemandirian Narapidana (Vol : 20 Napi)	20 Narapidana	38.300.000	
	<b>Layanan Perawatan Narapidana/tahanan</b>			
	35 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	10 Narapidana/ tahanan	26.400.000	
	36 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	10 Narapidana/ tahanan	32.780.000	
	37 Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi	10 Narapidana/ tahanan	14.700.000	
	<b>Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak</b>			
	38 Pelatihan Keterampilan Anak (Vol : Per 20 Anak)	20 Anak	23.300.000	
	39 Pembinaan Kepribadian Anak (Vol : Per 20 Anak)	20 Anak	23.300.000	
	40 Pengasuh Pemasyarakatan (Vol : Per 20 Anak)	20 Anak	17.920.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Tindak Lanjut Mou</b>			
	41 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Mou	1 Dokumen	30.666.000	
	<b>Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik</b>			
	42 Rekomendasi Penegakan Kode Etik	1 Dokumen	5.880.000	
	<b>Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen</b>			
	43 Penyelesaian Pengaduan	1 UPT	10.824.000	
	<b>Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan</b>			
	44 Pendampingan Peradilan Anak (Vol = Per Anak)	1 Klien	2.025.000	
	45 Pembimbingan dan Pengawasan Oleh Bapas (Vol = 1 Klien)	1 Klien	2.625.000	
	46 Rekomendasi Program Pelayanan dan Pembinaan	1 Klien	975.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.06	<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produk Intelijen Keimigrasian</b>			
	1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 Laporan	68.488.000	
	<b>Penyidikan Keimigrasian</b>			
	2 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	126.672.000	
	<b>Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian</b>			
	3 Pendeportasian Oleh Ditjen Imigrasi	1 Orang	4.922.000	
	<b>Pengawasan Keimigrasian</b>			
	4 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan Oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	68.488.000	
	5 Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan Oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	82.688.000	
	<b>Pengawasan Keimigrasian</b>			
	6 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Aceh	1 LHK	37.800.000	
	7 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	36.945.000	
	8 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Riau	1 LHK	37.984.000	
	9 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kepulauan Riau	1 LHK	33.533.000	
	10 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jambi	1 LHK	34.382.000	
	11 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	33.609.000	
	12 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	37.491.000	
	13 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Lampung	1 LHK	33.108.000	
	14 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	36.621.000	
	15 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	35.654.000	
	16 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Banten	1 LHK	36.051.000	
	17 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	34.996.000	
	18 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	39.113.000	
	19 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	33.788.000	
	20 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Yogyakarta	1 LHK	37.110.000	
	21 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Timur	1 LHK	35.468.000	
	22 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bali	1 LHK	36.935.000	
	23 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di NTB	1 LHK	38.096.000	
	24 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di NTT	1 LHK	35.431.000	
	25 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Barat	1 LHK	39.264.000	
	26 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1 LHK	39.976.000	
	27 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1 LHK	34.024.000	
	28 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Timur	1 LHK	64.090.000	
	29 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Utara	1 LHK	63.930.000	
	30 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Utara	1 LHK	36.228.000	
	31 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Gorontalo	1 LHK	41.986.000	
	32 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Barat	1 LHK	36.506.000	
	33 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1 LHK	37.083.000	
	34 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1 LHK	39.517.000	
	35 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1 LHK	38.037.000	
	36 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Maluku	1 LHK	54.686.000	
	37 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Maluku Utara	1 LHK	54.425.000	
	38 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Papua	1 LHK	87.356.000	
	39 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Papua Barat	1 LHK	83.867.000	
	40 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Aceh	1 LHK	37.800.000	
	41 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Utara	1 LHK	36.945.000	
	42 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Riau	1 LHK	37.984.000	
	43 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kepulauan Riau	1 LHK	33.533.000	
	44 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jambi	1 LHK	34.382.000	
	45 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Barat	1 LHK	33.609.000	
	46 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Selatan	1 LHK	37.491.000	
	47 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Lampung	1 LHK	33.108.000	
	48 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bengkulu	1 LHK	36.621.000	
	49 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bangka Belitung	1 LHK	35.654.000	
	50 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Banten	1 LHK	36.051.000	
	51 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Barat	1 LHK	34.996.000	
	52 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jakarta	1 LHK	39.113.000	
	53 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Tengah	1 LHK	33.788.000	
	54 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Yogyakarta	1 LHK	37.110.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
55	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Timur	1 LHK	35.468.000	
56	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bali	1 LHK	36.935.000	
57	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTB	1 LHK	38.096.000	
58	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTT	1 LHK	35.431.000	
59	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Barat	1 LHK	39.264.000	
60	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Tengah	1 LHK	39.976.000	
61	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Selatan	1 LHK	34.024.000	
62	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Timur	1 LHK	64.090.000	
63	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Utara	1 LHK	63.930.000	
64	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Utara	1 LHK	36.228.000	
65	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Gorontalo	1 LHK	41.986.000	
66	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Barat	1 LHK	36.506.000	
67	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Selatan	1 LHK	37.083.000	
68	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tengah	1 LHK	39.517.000	
69	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tenggara	1 LHK	38.037.000	
70	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku	1 LHK	54.686.000	
71	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku Utara	1 LHK	54.425.000	
72	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua	1 LHK	87.356.000	
73	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua Barat	1 LHK	83.867.000	
74	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Aceh	1 LHK	67.702.000	
75	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Utara	1 LHK	66.520.000	
76	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Riau	1 LHK	71.054.000	
77	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kepulauan Riau	1 LHK	62.244.000	
78	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jambi	1 LHK	62.640.000	
79	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Barat	1 LHK	62.380.000	
80	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Selatan	1 LHK	68.857.000	
81	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Lampung	1 LHK	59.158.000	
82	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bengkulu	1 LHK	67.588.000	
83	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bangka Belitung	1 LHK	64.434.000	
84	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Banten	1 LHK	67.162.000	
85	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Barat	1 LHK	65.390.000	
86	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jakarta	1 LHK	77.424.000	
87	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Tengah	1 LHK	60.192.000	
88	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Yogyakarta	1 LHK	78.190.000	
89	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Timur	1 LHK	65.808.000	
90	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bali	1 LHK	73.560.000	
91	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTB	1 LHK	72.570.000	
92	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTT	1 LHK	66.530.000	
93	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Barat	1 LHK	71.836.000	
94	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Tengah	1 LHK	71.543.000	
95	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Selatan	1 LHK	62.390.000	
96	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Timur	1 LHK	121.358.000	
97	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Utara	1 LHK	121.198.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
98	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Utara	1 LHK	66.724.000	
99	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Gorontalo	1 LHK	79.058.000	
100	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Barat	1 LHK	69.240.000	
101	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Selatan	1 LHK	70.645.000	
102	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tengah	1 LHK	75.533.000	
103	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tenggara	1 LHK	71.422.000	
104	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku	1 LHK	101.169.000	
105	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku Utara	1 LHK	101.010.000	
106	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua	1 LHK	171.003.000	
107	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua Barat	1 LHK	159.210.000	
	<b>Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian</b>			
108	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Aceh	1 Orang	20.536.000	
109	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Utara	1 Orang	19.036.000	
110	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Riau	1 Orang	16.666.000	
111	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kepulauan Riau	1 Orang	15.698.000	
112	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jambi	1 Orang	14.886.000	
113	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Barat	1 Orang	16.158.000	
114	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Selatan	1 Orang	14.731.000	
115	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Lampung	1 Orang	12.487.000	
116	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bengkulu	1 Orang	15.610.000	
117	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bangka Belitung	1 Orang	13.827.000	
118	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Banten	1 Orang	6.835.000	
119	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Barat	1 Orang	7.263.000	
120	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jakarta	1 Orang	4.922.000	
121	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah	1 Orang	13.629.000	
122	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Yogyakarta	1 Orang	14.735.000	
123	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Timur	1 Orang	15.753.000	
124	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bali	1 Orang	17.419.000	
125	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTB	1 Orang	17.837.000	
126	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTT	1 Orang	21.462.000	
127	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat	1 Orang	16.588.000	
128	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Tengah	1 Orang	16.931.000	
129	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Selatan	1 Orang	16.195.000	
130	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Timur	1 Orang	25.224.000	
131	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Utara	1 Orang	27.562.000	
132	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Utara	1 Orang	21.827.000	
133	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Gorontalo	1 Orang	22.702.000	
134	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Barat	1 Orang	22.047.000	
135	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan	1 Orang	18.895.000	
136	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tengah	1 Orang	22.599.000	
137	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tenggara	1 Orang	20.003.000	
138	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku	1 Orang	30.897.000	
139	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku Utara	1 Orang	29.718.000	
140	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua	1 Orang	40.903.000	
141	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua Barat	1 Orang	45.816.000	
142	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sumatera Utara	1 Orang	19.036.000	
143	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Riau	1 Orang	16.666.000	
144	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kepulauan Riau	1 Orang	15.698.000	
145	Pendeportasian Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta	1 Orang	4.922.000	
146	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa Tengah	1 Orang	13.629.000	
147	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa Timur	1 Orang	15.753.000	
148	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Bali	1 Orang	17.419.000	
149	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di NTT	1 Orang	21.462.000	
150	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kalimantan Barat	1 Orang	16.588.000	
151	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kalimantan Timur	1 Orang	25.224.000	
152	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sulawesi Utara	1 Orang	21.827.000	
153	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sulawesi Selatan	1 Orang	18.895.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	154 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Papua <b>Penyidikan Keimigrasian</b>	1 Orang	40.903.000	
	155 Penyidikan Keimigrasian di Aceh	1 LHK	89.860.000	
	156 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	86.499.000	
	157 Penyidikan Keimigrasian di Riau	1 LHK	88.960.000	
	158 Penyidikan Keimigrasian di Kepulauan Riau	1 LHK	72.405.000	
	159 Penyidikan Keimigrasian di Jambi	1 LHK	78.616.000	
	160 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	74.831.000	
	161 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	84.900.000	
	162 Penyidikan Keimigrasian di Lampung	1 LHK	73.504.000	
	163 Penyidikan Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	86.781.000	
	164 Penyidikan Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	78.616.000	
	165 Penyidikan Keimigrasian di Banten	1 LHK	83.613.000	
	166 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	78.846.000	
	167 Penyidikan Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	93.915.000	
	168 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	74.614.000	
	169 Penyidikan Keimigrasian di Yogyakarta	1 LHK	86.199.000	
	170 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Timur	1 LHK	79.784.000	
	171 Penyidikan Keimigrasian di Bali	1 LHK	84.337.000	
	172 Penyidikan Keimigrasian di NTB	1 LHK	91.196.000	
	173 Penyidikan Keimigrasian di NTT	1 LHK	81.213.000	
	174 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Barat	1 LHK	96.114.000	
	175 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1 LHK	95.927.000	
	176 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1 LHK	77.052.000	
	177 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Timur	1 LHK	186.590.000	
	178 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Utara	1 LHK	186.238.000	
	179 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Utara	1 LHK	82.066.000	
	180 Penyidikan Keimigrasian di Gorontalo	1 LHK	106.250.000	
	181 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Barat	1 LHK	85.314.000	
	182 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1 LHK	87.152.000	
	183 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1 LHK	95.508.000	
	184 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1 LHK	90.339.000	
	185 Penyidikan Keimigrasian di Maluku	1 LHK	152.961.000	
	186 Penyidikan Keimigrasian di Maluku Utara	1 LHK	152.441.000	
	187 Penyidikan Keimigrasian di Papua	1 LHK	273.565.000	
	188 Penyidikan Keimigrasian di Papua Barat	1 LHK	262.615.000	
<b>013.09</b>	<b>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah</b>			
	1 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Aceh	1 Layanan	29.785.000	
	2 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Utara	1 Layanan	30.345.000	
	3 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Barat	1 Layanan	31.090.000	
	4 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Riau	1 Layanan	30.700.000	
	5 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kepulauan Riau	1 Layanan	31.235.000	
	6 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jambi	1 Layanan	29.920.000	
	7 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bangka Belitung	1 Layanan	30.910.000	
	8 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Selatan	1 Layanan	40.260.000	
	9 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bengkulu	1 Layanan	31.040.000	
	10 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Lampung	1 Layanan	30.900.000	
	11 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Banten	1 Layanan	32.040.000	
	12 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil DKI Jakarta	1 Layanan	30.595.000	
	13 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Jawa Barat	1 Layanan	30.325.000	
	14 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Tengah	1 Layanan	29.480.000	
	15 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Yogyakarta	1 Layanan	30.310.000	
	16 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Timur	1 Layanan	30.390.000	
	17 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bali	1 Layanan	31.580.000	
	18 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil NTB	1 Layanan	30.835.000	
	19 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil NTT	1 Layanan	31.035.000	
	20 Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Barat	1 Layanan	30.540.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
21	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Tengah	1 Layanan	30.150.000	
22	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Selatan	1 Layanan	30.625.000	
23	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Timur	1 Layanan	30.855.000	
24	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Gorontalo	1 Layanan	30.545.000	
25	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Utara	1 Layanan	32.425.000	
26	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Tengah	1 Layanan	29.835.000	
27	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Barat	1 Layanan	30.495.000	
28	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Selatan	1 Layanan	30.780.000	
29	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Layanan	30.070.000	
30	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Maluku	1 Layanan	31.995.000	
31	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Maluku Utara	1 Layanan	33.005.000	
32	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Papua	1 Layanan	33.015.000	
33	Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Papua Barat	1 Layanan	33.020.000	
34	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Aceh	1 Layanan	59.610.000	
35	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera	1 Layanan	58.520.000	
36	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera	1 Layanan	64.650.000	
37	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Riau	1 Layanan	59.500.000	
38	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kepulauan Riau	1 Layanan	57.208.000	
39	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jambi	1 Layanan	56.230.000	
40	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bangka Belitung	1 Layanan	57.670.000	
41	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera Selatan	1 Layanan	59.510.000	
42	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bengkulu	1 Layanan	57.820.000	
43	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Lampung	1 Layanan	58.860.000	
44	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Banten	1 Layanan	59.975.000	
45	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil DKI Jakarta	1 Layanan	49.387.000	
46	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Barat	1 Layanan	56.500.000	
47	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Tengah	1 Layanan	55.340.000	
48	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Yogyakarta	1 Layanan	57.975.000	
49	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Timur	1 Layanan	76.170.000	
50	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bali	1 Layanan	75.820.000	
51	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil NTB	1 Layanan	66.220.000	
52	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil NTT	1 Layanan	75.080.000	
53	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Barat	1 Layanan	59.825.000	
54	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Tengah	1 Layanan	66.590.000	
55	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Selatan	1 Layanan	68.570.000	
56	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Timur	1 Layanan	78.610.000	
57	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Gorontalo	1 Layanan	59.392.000	
58	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Utara	1 Layanan	80.380.000	
59	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Palu	1 Layanan	61.700.000	
60	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Barat	1 Layanan	51.490.000	
61	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Selatan	1 Layanan	71.390.000	
62	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Layanan	73.520.000	
63	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Maluku	1 Layanan	66.528.000	
64	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Maluku Utara	1 Layanan	73.232.000	
65	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Papua	1 Layanan	118.979.000	
66	Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Papua Barat	1 Layanan	93.095.000	
	<b>Pembangunan Hak Asasi Manusia di Wilayah</b>			
67	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Aceh	1 Pemda	28.280.000	
68	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sumatera Utara	1 Pemda	90.900.000	
69	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sumatera Barat	1 Pemda	58.700.000	
70	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Riau	1 Pemda	55.580.000	
71	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Kepulauan Riau	1 Pemda	53.232.000	
72	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Jambi	1 Pemda	59.495.000	
73	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Bangka Belitung	1 Pemda	73.830.000	
74	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sumatera Selatan	1 Pemda	66.190.000	
75	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Bengkulu	1 Pemda	66.435.000	
76	Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Lampung	1 Pemda	68.780.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	77 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Banten	1 Pemda	61.796.000	
	78 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil DKI Jakarta	1 Pemda	213.270.000	
	79 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Jawa Barat	1 Pemda	104.087.000	
	80 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Jawa Tengah	1 Pemda	129.200.000	
	81 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Yogyakarta	1 Pemda	65.365.000	
	82 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Jawa Timur	1 Pemda	57.930.000	
	83 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Bali	1 Pemda	60.210.000	
	84 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil NTB	1 Pemda	71.420.000	
	85 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil NTT	1 Pemda	80.910.000	
	86 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Kalimantan Barat	1 Pemda	75.710.000	
	87 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Kalimantan Tengah	1 Pemda	63.190.000	
	88 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Kalimantan Selatan	1 Pemda	73.277.000	
	89 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Kalimantan Timur	1 Pemda	58.330.000	
	90 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Gorontalo	1 Pemda	52.550.000	
	91 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sulawesi Utara	1 Pemda	59.844.000	
	92 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sulawesi Tengah	1 Pemda	75.262.000	
	93 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sulawesi Barat	1 Pemda	52.037.000	
	94 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sulawesi Selatan	1 Pemda	85.760.000	
	95 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Pemda	50.066.000	
	96 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Maluku	1 Pemda	73.522.000	
	97 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Maluku Utara	1 Pemda	80.460.000	
	98 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Papua	1 Pemda	66.719.000	
	99 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Papua Barat	1 Pemda	81.449.000	
	100 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Aceh	1 Pemda	61.820.000	
	101 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sumatera Utara	1 Pemda	100.395.000	
	102 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sumatera Barat	1 Pemda	63.475.000	
	103 Aksi HAM Pemerintah Daerah Kanwil Riau	1 Pemda	66.660.000	
	104 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Kepulauan Riau	1 Pemda	78.419.000	
	105 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Jambi	1 Pemda	79.790.000	
	106 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Bangka Belitung	1 Pemda	61.490.000	
	107 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sumatera Selatan	1 Pemda	57.561.000	
	108 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Bengkulu	1 Pemda	90.630.000	
	109 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Lampung	1 Pemda	58.680.000	
	110 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Banten	1 Pemda	58.491.000	
	111 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil DKI Jakarta	1 Pemda	154.862.000	
	112 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Jawa Barat	1 Pemda	89.829.000	
	113 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Jawa Tengah	1 Pemda	89.960.000	
	114 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Yogyakarta	1 Pemda	68.118.000	
	115 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Jawa Timur	1 Pemda	71.709.000	
	116 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Bali	1 Pemda	99.060.000	
	117 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil NTB	1 Pemda	78.840.000	
	118 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil NTT	1 Pemda	64.317.000	
	119 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Kalimantan Barat	1 Pemda	79.990.000	
	120 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Kalimantan Tengah	1 Pemda	74.245.000	
	121 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Kalimantan Selatan	1 Pemda	89.026.000	
	122 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Kalimantan Timur	1 Pemda	63.692.000	
	123 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Gorontalo	1 Pemda	69.998.000	
	124 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sulawesi Utara	1 Pemda	64.490.000	
	125 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sulawesi Tengah	1 Pemda	89.472.000	
	126 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sulawesi Barat	1 Pemda	76.591.000	
	127 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sulawesi Selatan	1 Pemda	82.100.000	
	128 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Pemda	81.460.000	
	129 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Maluku	1 Pemda	91.643.000	
	130 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Maluku Utara	1 Pemda	97.640.000	
	131 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Papua	1 Pemda	66.154.000	
	132 Kab/Kota Peduli HAM Kanwil Papua Barat	1 Pemda	76.109.000	
<b>013.10</b>	<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Orang/Kasus	8.000.000	
	2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	
<b>013.12</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	270 Orang	2.684.125.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
015.11	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama - BLU</b>			
	1 Layanan Program Pendidikan Diploma I Kerjasama	1 Layanan	885.360.000	
	2 Layanan Program Pendidikan Diploma III Kerjasama	1 Layanan	1.717.438.000	
	3 Layanan Pelatihan 3 Hari	1 Layanan	63.426.000	
	4 Layanan Pelatihan 5 Hari	1 Layanan	87.154.000	
	5 Layanan Pelatihan 10 Hari	1 Layanan	160.424.000	
	6 Layanan Pelatihan 15 Hari	1 Layanan	242.860.000	
	7 Layanan Pelatihan 30 Hari	1 Layanan	450.670.000	
	8 Layanan Pelatihan 60 Hari	1 Layanan	877.686.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama - BLU</b>			
	9 Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Program Diploma Reguler	1 Layanan	309.422	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			
	1 Publikasi Statistik Pertanian	1 Layanan	188.280.000	
018.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	144 Rekomendasi	3.392.864.000	
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	144 Rekomendasi	2.136.528.000	
	3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I-Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Reviu SAKIP Kementerian	11 Rekomendasi	148.632.000	
	4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	49 Rekomendasi	673.848.000	
	5 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	130 Rekomendasi	3.401.564.000	
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	144 Rekomendasi	2.136.528.000	
	7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	6 Rekomendasi	73.560.000	
	8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	30 Rekomendasi	202.830.000	
	9 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	141 Rekomendasi	3.392.864.000	
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	144 Rekomendasi	2.136.528.000	
	11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	9 Rekomendasi	100.740.000	
	12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	45 Rekomendasi	293.370.000	
	13 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	153 Rekomendasi	3.450.776.000	
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	144 Rekomendasi	2.136.528.000	
	15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	9 Rekomendasi	81.540.000	
	16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	45 Rekomendasi	271.620.000	
	17 Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	213 Rekomendasi	4.464.034.000	
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu</b>			
	18 Audit Investigasi	21 Rekomendasi	680.350.000	
	19 Audit dengan Tujuan Tertentu	192 Rekomendasi	4.591.296.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.03	<b>Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Penerapan Penanganan DPI</b>			
	1 Pembuatan Lubang Biopori	1 Hektar	4.130.000	
	2 Pembuatan Lubang Biopori Wilayah Remote	1 Hektar	4.602.500	
	3 Pembuatan Sumur Pantek	1 Hektar	5.660.000	
	4 Pembuatan Sumur Pantek Wilayah Remote	1 Hektar	6.717.500	
018.04	<b>Direktorat Jenderal Hortikultura</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>GAP Sayuran dan Tanaman Obat</b>			
	1 GAP Cabai	1 Kelompok	39.261.000	
	2 GAP Sayuran Lainnya	1 Kelompok	39.261.000	
	3 GAP Bawang Merah	1 Kelompok	39.261.000	
	<b>Penerapan PHT (PPHT)</b>			
	4 Penerapan PHT Wilayah Barat	1 Kelompok	43.000.000	
	5 Penerapan PHT Wilayah Timur	1 Kelompok	45.000.000	
	<b>GAP Buah dan Florikultura</b>			
	6 GAP Buah	1 Kelompok	40.000.000	
	7 GAP Florikultura	1 Kelompok	40.000.000	
	<b>GHP Hortikultura</b>			
	8 GHP Buah	1 Kelompok	40.000.000	
	9 GHP Sayuran	1 Kelompok	40.000.000	
018.08	<b>Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Pengembangan Sumber Air</b>			
	1 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000	
	2 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000	
	3 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Timur	1 Unit	105.000.000	
	4 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000	
	5 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000	
	6 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Tengah	1 Unit	85.000.000	
	7 Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000	
	8 Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000	
	9 Irigasi Perpompaaan Kecil Wilayah Barat	1 Unit	76.000.000	
018.09	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan</b>			
	1 Bahan Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	250.000.000	
	<b>Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi</b>			
	2 Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100 Jenis	229.571.000	
018.10	<b>Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian</b>  <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian</b>			
	1 Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 7 Hari	1 Orang	4.326.000	
	2 Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 5 Hari	1 Orang	2.016.666	
	3 Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 3 Hari	1 Orang	1.438.333	
	4 Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 3 Hari	1 Orang	1.438.333	
	5 Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 5 Hari	1 Orang	2.016.666	
	6 Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 7 Hari	1 Orang	4.763.333	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	7 Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 3 Hari	1 Orang	1.438.333	
	8 Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 5 Hari	1 Orang	2.016.666	
	9 Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 7 Hari	1 Orang	5.925.333	
	10 Pelatihan Teknis Tematik Peternakan 3 Hari	1 Orang	1.471.666	
	11 Pelatihan Teknis Tematik Peternakan 5 Hari	1 Orang	2.080.000	
	12 Pelatihan Teknis Tematik Peternakan 7 Hari	1 Orang	6.285.500	
	13 Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian 14 Hari	1 Orang	4.462.666	
	14 Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian 21 Hari	1 Orang	5.872.000	
	15 Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 21 Hari	1 Orang	9.485.666	
	16 Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 14 Hari	1 Orang	8.020.333	
	17 Pelatihan Manajemen UPJA 7 Hari	1 Orang	5.216.333	
	18 Pelatihan UPJA 7 Hari	1 Orang	4.344.000	
	19 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kepala BPP/UPTD 7 Hari	1 Orang	4.399.666	
	20 Pelatihan Teknis Alsintan 3 Hari	1 Orang	1.438.333	
	21 Pelatihan Teknis Alsintan 5 Hari	1 Orang	2.016.666	
	22 Pelatihan Teknis Alsintan 7 Hari	1 Orang	4.377.333	
	<b>Mahasiswa Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian</b>			
	23 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Pertanian	1 Orang	30.213.428	
	24 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Peternakan	1 Orang	31.213.428	
	25 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Perkebunan	1 Orang	30.410.000	
	26 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Pertanian	1 Orang	22.387.000	
	27 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi	1 Orang	24.287.828	
	28 Diploma IV Program Studi Penyuluhan Peternakan dan	1 Orang	22.615.000	
	29 Diploma IV Program Studi Teknologi Produksi Tanaman	1 Orang	25.134.857	
	30 Diploma IV Program Studi Agribisnis Hortikultura	1 Orang	23.220.685	
	31 Diploma IV Program Studi Teknologi Benih	1 Orang	23.492.228	
	32 Diploma IV Program Studi Teknologi Pakan Ternak	1 Orang	22.038.714	
	33 Diploma IV Program Studi Teknologi Produksi Ternak	1 Orang	22.745.914	
	34 Diploma IV Program Studi Agribisnis Peternakan	1 Orang	22.646.000	
	35 Diploma III Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian	1 Orang	24.872.771	
	36 Diploma III Program Studi Kesehatan Hewan	1 Orang	26.062.000	
	37 Diploma III Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura	1 Orang	24.816.628	
	38 Diploma III Program Studi Budidaya Ternak	1 Orang	24.467.771	
	39 Diploma III Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan	1 Orang	24.450.028	
	40 Diploma III Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil	1 Orang	24.352.200	
	41 Diploma III Program Studi Usaha Budidaya Ternak	1 Orang	22.382.428	
	42 Diploma III Program Studi Pertanian Lahan Kering	1 Orang	23.666.142	
	43 Diploma III Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak	1 Orang	24.196.714	
<b>018.12</b>	<b>Badan Karantina Pertanian</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati</b>			
	1 Metoda Uji Terap Teknik dan Metoda Perkarantinaaan yang Dimanfaatkan	1 Uji Terap	141.203.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Perindustrian (019)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
019.04	<b>Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan</b>			
	1 Perumusan SNI	1 RSNI	594.165.000	Perumusan SNI dengan Metode Pengembangan Sendiri
	<b>Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Elektronik dan Telematika</b>			
	2 Perumusan SNI	1 RSNI	594.165.000	Perumusan SNI dengan Metode Pengembangan Sendiri
	<b>Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Sektor Industri Elektronika dan Telematika</b>			
	3 Perumusan SKKNI	1 RSKKNI	649.725.000	
	<b>Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian</b>			
	4 Perumusan SNI	1 RSNI	594.165.000	Perumusan SNI dengan Metode Pengembangan Sendiri
	<b>Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian</b>			
	5 Perumusan SKKNI	1 RSKKNI	649.725.000	
	<b>Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam</b>			
	6 Perumusan SNI	1 RSNI	594.165.000	Perumusan SNI dengan Metode Pengembangan Sendiri
	<b>Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Sektor Industri Logam</b>			
	7 Perumusan SKKNI	1 RSKKNI	649.725.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.05	<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB</b>			
	1 Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium	1 Layanan	42.100.000	Layanan kewaspadaan dini berbasis lab untuk 1 tahun (4 kali/4 triwulan) untuk analisis 1 faktor resiko.
	2 Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	1 Layanan	2.035.000	Layanan sistsus dilakukan di luar jam kerja dan dilaksanakan 8 jam di tiap posko/lokasi.
	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan</b>			
	3 Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan Sertifikat SSCC/SSCEC	1 Layanan	480.000	Layanan kekarantinaan yang dilakukan di luar jam jam kerja atau hari libur. Untuk layanan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kapal, posisi kapal yang diperiksa adalah labuh.
	4 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan COP ( <i>Certificate Of Pratique</i> )	1 Layanan	550.000	Kegiatan rujukan minimal 8 jam.
	5 Layanan kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan penyeberangan	1 Layanan	561.000	
	6 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	1 Layanan	561.000	
	7 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHOC ( <i>Port Health Quarantine Clearance</i> )	1 Layanan	374.000	
	8 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	1 Layanan	748.000	
	9 Layanan Kekarantinaan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	1 Layanan	182.000	
	10 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	1 Layanan	155.000	
	11 Layanan Kegawat Daruratan dan Rujukan	1 Layanan	875.000	
	12 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Khusus Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	1.683.000	
	<b>Layanan Capaian Eliminasi Malaria</b>			
	13 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	30.000.000	Dilakukan untuk satuan kerja Dekonsentrasi, IRS dilakukan pada seluruh rumah di desa endemis malaria tinggi API>5 per 1.000. Survei mencakup minimal 80% penduduk di satu desa/wilayah.
	14 Sediaan Darah Mikroskop yang Di Uji Silang	1 Layanan	10.000	
	15 Survei Darah Massal Malaria ( <i>Angka Parasite Rate</i> )	1 Layanan	8.750.000	
	16 IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan Insektisida Pada Dinding Rumah) Di Daerah Sulit	1 Layanan	40.200.000	
	17 Survei Darah Massal Malaria ( <i>Angka Parasite Rate</i> ) Di Daerah Sulit	1 Layanan	13.850.000	
	<b>Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit</b>			
	18 Layanan Pengendalian Vektor DBD	1 Layanan	855.000	Survei dan pengendalian malaria dan DBD untuk wilayah 1 HA. Survei dan pengendalian vektor diare per lokasi pengendalian.
	19 Layanan <i>Survey</i> Vektor Pes	1 Layanan	2.072.000	Survei Pes untuk 4 hari pelaksanaan kegiatan.
	20 Layanan Pengendalian Vektor Diare	1 Layanan	427.000	
	21 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	1 Layanan	1.227.000	
	22 Layanan <i>Survey</i> Vektor DBD	1 Layanan	165.000	
	23 Layanan <i>Survey</i> Vektor Diare	1 Layanan	315.000	
	24 Layanan <i>Survey</i> Vektor Malaria	1 Layanan	1.557.000	
	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</b>			
	25 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	1 Layanan	2.725.000	Biaya untuk pelaksanaan VCT dengan target 100 tes tidak termasuk biaya operasional.
	<b>Layanan Pengendalian Penyakit TB</b>			
	26 Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Wilayah Kerja KKP	1 Layanan	4.555.000	Biaya untuk pengadaan bahan pelaksanaan. Biaya operasional hanya untuk petugas fasyankes.
	<b>Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular</b>			
	27 Layanan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Desa	1 Layanan	135.785.000	Pelaksanaan deteksi dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dan dilaksanakan selama 6 bulan di 5 desa dalam 1 kecamatan. Target orang yang dideteksi dalam tiap kali pelaksanaan kegiatan adalah 100 orang.

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	<b>Inspektorat Jenderal</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Layanan Audit Internal</b> 1 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah DKI Jakarta 2 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (Dalam Pulau Jawa) 3 Laporan Hasil Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (Luar Pulau Jawa)	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	18.575.000 90.864.000 139.594.000	

AGW

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.04	<b>Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			Orang Per Tahun
	1 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Pantii Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan	1 Orang	18.000.000	
	2 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Pantii Sosial Galih Pakuan Bogor	1 Orang	16.593.000	
	3 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Pantii Sosial Rehabilitasi Sosial KPN Satria Baturaden	1 Orang	21.665.966	
	<b>Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			Orang Per Tahun
	4 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong	1 Orang	28.575.583	
	5 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso Surakarta	1 Orang	20.571.767	
	6 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang	1 Orang	23.175.082	
	7 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar	1 Orang	18.548.091	
	8 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi	1 Orang	16.326.163	
	9 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjarbaru	1 Orang	17.987.200	
	10 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Laras Dharma Guna Bengkulu	1 Orang	15.549.900	
	11 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras di Pati	1 Orang	16.763.000	
	12 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung	1 Orang	14.691.834	
	13 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Netra Mahatmiya Tabanan	1 Orang	19.406.700	
	14 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Netra Tu Mou Tou Manado	1 Orang	17.783.360	
	15 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi	1 Orang	16.725.011	
	16 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta	1 Orang	20.524.875	
	17 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang	1 Orang	23.436.400	
	18 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan di Pantii Sosial Bina Rungu Wicara Meohai Kendari	1 Orang	20.109.280	
	19 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung	1 Orang	15.926.533	
	20 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Bogor	1 Orang	16.812.000	
	21 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pantii Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu	1 Orang	22.203.642	

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			Orang Per Tahun
	22 Wanita Tuna Susila yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta	1 Orang	14.928.500	
	23 Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi	1 Orang	8.464.448	
	24 Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Wasana Bahagia di Ternate	1 Orang	29.329.375	
	25 Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Bahagia di Medan	1 Orang	22.856.025	
	26 Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Kahuripan di Sukabumi	1 Orang	22.468.142	
	<b>Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	27 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta	1 Orang	16.634.244	
	28 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang	1 Orang	16.752.142	
	29 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram	1 Orang	15.825.000	
	30 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar	1 Orang	19.402.500	
	31 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru	1 Orang	11.083.000	
	32 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta	1 Orang	11.479.845	
	33 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Nai Bonat Kupang	1 Orang	11.926.583	
	34 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jambi	1 Orang	14.915.100	
	35 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussaadah Aceh	1 Orang	15.696.428	
	<b>Lanjut Usia yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			Orang Per Tahun
	36 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa	1 Orang	19.065.430	
	37 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi	1 Orang	16.271.983	
	38 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari	1 Orang	20.619.220	
027.11	<b>Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Dukungan Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial</b>			
	1 Layanan Dukungan Penelitian Program Nasional	1 Layanan	500.000.000	
	2 Layanan Dukungan Penelitian Mandiri	1 Layanan	19.000.000	
	3 Layanan Dukungan Penelitian Hibah Bersaing	1 Layanan	50.000.000	
	4 Layanan Dukungan Penelitian Kajian-Layanan	1 Layanan	75.000.000	
	5 Layanan Dukungan Penelitian Kerjasama	1 Layanan	185.000.000	
	6 Layanan Dukungan Penelitian Pengembangan Iptek Pekerjaan Sosial	1 Layanan	200.000.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran</b>			
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	1 TOT Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Layanan	541.548.000	
	2 TOT Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial	1 Layanan	532.898.000	
	3 TOT Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Layanan	568.117.000	
	<b>SDM Kesejahteraan Sosial yang Telah Dikembangkan Profesinya</b>			
	4 Peksos/ Penyuluh/TKS/Relawan yang Telah Mendapatkan Sertifikasi	1 Orang	2.828.433	
	<b>Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi</b>			
	5 Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Lembaga	3.063.100	



Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial</b>			
6	Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	7.994.637	
7	Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	29.133.380	
	<b>Lokasi yang Mendapatkan Layanan Penyuluhan Sosial</b>			
8	Penyusunan Buku Pedoman Penyuluhan Sosial	1 Layanan	580.080.000	
9	Penyuluhan Sosial Keliling Penyelenggaraan Program Kesos ( <i>Car Free Day</i> )	1 Layanan	681.006.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I</b>			
	1 Pengawasan Kegiatan Prioritas/SKPT Mitra Inspektorat I	1 Laporan	1.272.468.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II</b>			
	2 Pengawasan Kegiatan Prioritas/SKPT Mitra Inspektorat II	1 Laporan	1.386.344.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III</b>			
	3 Pengawasan Kegiatan Prioritas/SKPT Mitra Inspektorat III	1 Laporan	923.880.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV</b>			
	4 Pengawasan Kegiatan Prioritas/SKPT Mitra Inspektorat IV	1 Laporan	866.520.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP</b>			
	5 Audit Investigasi Lingkup KKP	1 Laporan	1.054.494.000	
032.04	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produksi Induk Unggul</b>			
	1 Calon Induk Unggul Ikan Mas	1 Ekor	32.851	
	2 Calon Induk Unggul Ikan Gurame	1 Ekor	34.762	
	3 Calon Induk Unggul Ikan Patin	1 Ekor	44.524	
	4 Calon Induk Unggul Ikan Nila	1 Ekor	16.236	
	5 Calon Induk Unggul Ikan Lele	1 Ekor	60.928	
	6 Calon Induk Unggul Udang Marguensis	1 Ekor	87.593	
	7 Calon Induk Unggul Udang Windu	1 Ekor	96.597	
	8 Calon Induk Unggul Udang Vanamae	1 Ekor	37.034	
	9 Calon Induk Unggul Ikan Kerapu	1 Ekor	350.053	
	10 Calon Induk Unggul Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	320.250	
	11 Calon Induk Unggul Ikan Kakap Putih	1 Ekor	306.046	
	12 Calon Induk Unggul Ikan Bubara	1 Ekor	315.460	
	13 Calon Induk Unggul Ikan Bandeng	1 Ekor	385.804	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Tawar Yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	14 Benih Ikan Nila	1 Ekor	244	
	15 Benih Ikan Mas	1 Ekor	276	
	16 Benih Ikan Lele	1 Ekor	1.789	
	17 Benih Ikan Gurame	1 Ekor	312	
	18 Benih Ikan Patin	1 Ekor	299	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Payau yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	19 Benih Udang <i>Merguenses</i> (putih)	1 Ekor	47	
	20 Benih Udang Windu	1 Ekor	41	
	21 Benih Udang <i>Vanamei</i>	1 Ekor	38	
	22 Benih Ikan Bandeng	1 Ekor	199	
	23 Benih Ikan Nila Salin	1 Ekor	240	
	24 Benih Kepiting	1 Ekor	469	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	25 Benih Ikan Kerapu	1 Ekor	10.228	
	26 Benih Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	6.249	
	27 Benih Ikan Kakap Putih	1 Ekor	4.358	
	28 Benih Ikan Bubara	1 Ekor	6.249	
	29 Benih Ikan Hias	1 Ekor	1.403	

Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Sampel yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan</b>			
	30 Sampel Obat dan Residu	1 Sampel	869.905	
	31 Sampel Kualitas Air	1 Sampel	115.060	
	32 Sampel Patologi	1 Sampel	508.962	
	33 Sampel Mikrobiologi	1 Sampel	866.357	
	<b>Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT</b>			
	34 Pakan Ikan Air Tawar Terapung	1 Unit	10.566	
	35 Pakan Tenggelam Ikan Air Tawar	1 Unit	7.068	
	36 Pakan Terapung Ikan Air Payau	1 Unit	9.848	
	37 Pakan Tenggelam Ikan Air Payau	1 Unit	12.046	
<b>032.05</b>	<b>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</b>			
	1 PPNS Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	1.449.690.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</b>			
	2 Operasional Speed Boat 6 M	1 Hari Operasi	2.485.000	
	3 Operasional Speed Boat 8 M	1 Hari Operasi	3.106.000	
	4 Operasional Speed Boat 12 M	1 Hari Operasi	6.618.000	
	5 Operasional Rigid Inflatable Boat	1 Hari Operasi	5.906.000	
	6 Operasional Rubber Boat	1 Hari Operasi	2.284.000	
<b>032.12</b>	<b>Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih</b>			
	1 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah I	1 Orang	2.489.000	
	2 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah II	1 Orang	2.885.000	
	3 Pelatihan Masyarakat melalui Safari Pelatihan di Wilayah III	1 Orang	3.364.000	
	4 Pelatihan Masyarakat di Balai Pelatihan KP	1 Orang	3.719.000	
	5 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah I	1 Orang	6.580.000	
	6 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah II	1 Orang	7.633.000	
	7 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Pemagangan Wilayah III	1 Orang	8.885.000	
	<b>Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi</b>			
	8 Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi KP melalui LSP 1	1 Orang	500.000	
	9 Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi KP melalui LSP 3	1 Orang	710.000	
	<b>Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Kompeten</b>			
	10 Diklat Teknis bagi PPNS Bidang KP	1 Orang	13.170.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
033.13	<b>Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran</b> <b>(Sub Output)</b>			
	<b>Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>			
	1 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Banda Aceh	1 Angkatan	13.350.000	20 orang peserta
	2 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Medan	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	3 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Pekanbaru	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	4 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Tanjung Pinang	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	5 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Jambi	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	6 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Padang	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	7 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Palembang	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	8 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Bandar	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	9 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Bengkulu	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	10 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Pangkal Pinang	1 Angkatan	13.950.000	20 orang peserta
	11 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Serang	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	12 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Bandung	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	13 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Jakarta	1 Angkatan	15.450.000	20 orang peserta
	14 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Semarang	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	15 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Yogyakarta	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	16 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Surabaya	1 Angkatan	13.950.000	20 orang peserta
	17 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Denpasar	1 Angkatan	14.850.000	20 orang peserta
	18 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Mataram	1 Angkatan	14.550.000	20 orang peserta
	19 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Kupang	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	20 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Pontianak	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	21 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Palangkaraya	1 Angkatan	13.350.000	20 orang peserta
	22 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Banjarmasin	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	23 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Samarinda	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	24 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Tanjung Selor	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	25 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Manado	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	26 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Gorontalo	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	27 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Mamuju	1 Angkatan	13.950.000	20 orang peserta
	28 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Makassar	1 Angkatan	14.250.000	20 orang peserta
	29 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Palu	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	30 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Kendari	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	31 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Ambon	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	32 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Sofifi	1 Angkatan	13.650.000	20 orang peserta
	33 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Jayapura	1 Angkatan	16.050.000	20 orang peserta
	34 Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi di Manokwari	1 Angkatan	14.850.000	20 orang peserta

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	<b>Badan Pusat Statistik</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
	1 Laporan Hasil Audit	14 Layanan	2.356.385.000	
	2 Laporan Hasil Reviu	12 Layanan	344.900.000	
	3 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas	12 Layanan	307.219.000	
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
	4 Laporan Hasil Audit	14 Layanan	1.998.747.000	
	5 Laporan Hasil Reviu	12 Layanan	411.224.000	
	6 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas	12 Layanan	354.046.000	
	<b>Layanan Audit Internal</b>			
	7 Laporan Hasil Audit	14 Layanan	2.173.471.000	
	8 Laporan Hasil Reviu	12 Layanan	409.692.000	
	9 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas	12 Layanan	250.241.000	
<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>				
<b>Layana Pendidikan dan Pelatihan</b>				
1 Diklat Teknis Substansi	1 Layanan	346.625.000		
2 Diklat Fungsional	1 Layanan	473.093.000		
3 Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	274.113.250		

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peta Bidang Tanah</b>			
	1 Peta Bidang Tanah Kategori I (ASN)	1 Bidang	332.200	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	2 Peta Bidang Tanah Kategori II (ASN)	1 Bidang	282.140	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	3 Peta Bidang Tanah Kategori III (ASN)	1 Bidang	233.520	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	4 Peta Bidang Tanah Kategori IV (ASN)	1 Bidang	180.620	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	5 Peta Bidang Tanah Kategori V (ASN)	1 Bidang	129.140	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	6 Peta Bidang Tanah Kategori VI (ASN)	1 Bidang	279.440	Wilayah Kepulauan
	7 Peta Bidang Tanah Kategori I (Pihak Ketiga)	1 Bidang	575.216	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
	8 Peta Bidang Tanah Kategori II (Pihak Ketiga)	1 Bidang	487.333	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	9 Peta Bidang Tanah Kategori III (Pihak Ketiga)	1 Bidang	399.867	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	10 Peta Bidang Tanah Kategori IV (Pihak Ketiga)	1 Bidang	308.444	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	11 Peta Bidang Tanah Kategori V (Pihak Ketiga)	1 Bidang	219.645	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	12 Peta Bidang Tanah Kategori I (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	371.380	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	13 Peta Bidang Tanah Kategori II (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	325.160	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	14 Peta Bidang Tanah Kategori III (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	280.780	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	15 Peta Bidang Tanah Kategori IV (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	232.500	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	16 Peta Bidang Tanah Kategori V (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	185.520	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Bali
	17 Peta Bidang Tanah Kategori VI (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	346.880	Wilayah Kepulauan
	18 Peta Bidang Tanah Kategori I (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga)	1 Bidang	646.799	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	19 Peta Bidang Tanah Kategori II (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga)	1 Bidang	557.501	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	20 Peta Bidang Tanah Kategori III (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga)	1 Bidang	469.185	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	21 Peta Bidang Tanah Kategori IV (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga)	1 Bidang	376.837	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	22 Peta Bidang Tanah Kategori V (Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga)	1 Bidang	287.138	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Sertipikat Hak Atas Tanah</b>			
23	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I (ASN)	1 Bidang	249.400	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
24	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II (ASN)	1 Bidang	216.500	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepr., Bangka Belitung
25	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III (ASN)	1 Bidang	184.540	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
26	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV (ASN)	1 Bidang	149.760	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Gorontalo
27	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V (ASN)	1 Bidang	115.920	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
28	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI (ASN)	1 Bidang	309.320	Wilayah Kepulauan
29	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	205.400	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
30	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	178.440	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
31	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	152.260	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
32	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	123.780	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
33	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	96.060	Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
34	Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI (Partisipasi Masyarakat dan ASN)	1 Bidang	288.960	Wilayah Kepulauan
35	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori I (1 s/d 25.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	1.643.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
36	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori II (1 s/d 25.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	1.388.000	Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung
37	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori III (1 s/d 25.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	1.133.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
38	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori IV (1 s/d 25.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	863.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
39	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori V (1 s/d 25.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	593.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
40	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori I (25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	3.406.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
41	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori II (25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	2.862.000	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
42	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori III (25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	2.318.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
43	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori IV (25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	1.742.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
44	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori V (25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	1.106.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
45	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori I (> 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	6.597.000	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT
46	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori II (> 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	5.560.000	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babel
47	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori III (> 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	4.523.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
48	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori IV (> 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	3.425.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
49	Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional Kategori V (> 100.000 M <sup>2</sup> )	1 Bidang	2.327.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	<b>Sertipikat Redistribusi Tanah</b>			
50	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> Kategori I	1 Bidang	1.105.721	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
51	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> Kategori II	1 Bidang	927.658	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babel
52	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> Kategori III	1 Bidang	773.699	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar, Gorontalo
53	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> Kategori IV	1 Bidang	621.024	Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu
54	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> Kategori V	1 Bidang	458.047	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten, DKI Jakarta
	<b>Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T</b>			
55	Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori I	1 Bidang	140.643	Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat
56	Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori II	1 Bidang	121.720	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Bangka Belitung, Kepri
57	Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori III	1 Bidang	108.050	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar, Gorontalo
58	Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori IV	1 Bidang	101.501	Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu
59	Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori V	1 Bidang	97.654	Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Banten, DKI Jakarta
	<b>Neraca Penatagunaan Tanah</b>			
60	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori I	1 Kab/Kota	220.437.000	Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara
61	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori II	1 Kab/Kota	172.601.000	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra
62	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori III	1 Kab/Kota	159.778.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung dan Lampung
63	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori IV	1 Kab/Kota	172.615.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali
64	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori I	1 Kecamatan	130.338.000	Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara
65	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II	1 Kecamatan	107.789.000	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra
66	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori III	1 Kecamatan	103.700.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung
67	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Kecamatan	107.833.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
	<b>Sertipikat Konsolidasi Tanah</b>			
68	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	1.715.980	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
69	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	1.413.480	Sulut,Sulteng,Sultra, NTB, Kepri,Babel
70	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	1.234.360	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
71	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	1.016.980	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
72	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	853.360	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
73	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori I (Nonpenetapan Lokasi)	1 Bidang	1.433.120	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
74	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori II (Nonpenetapan Lokasi)	1 Bidang	1.175.380	Sulut,Sulteng,Sultra, NTB, Kepri,Babel
75	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III (Nonpenetapan Lokasi)	1 Bidang	1.035.960	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
76	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori IV (Nonpenetapan Lokasi)	1 Bidang	859.420	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
77	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V (Nonpenetapan Lokasi)	1 Bidang	729.600	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
<b>Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah</b>				
78	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kategori I (Kecamatan)	1 Kecamatan	141.662.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
79	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kategori II (Kecamatan)	1 Kecamatan	124.523.000	Sulut,Sulteng,Sultra, NTB, Kepri, Babel
80	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kategori III (Kecamatan)	1 Kecamatan	121.325.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
81	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kategori IV (Kecamatan)	1 Kecamatan	116.588.000	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
82	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kategori V (Kecamatan)	1 Kecamatan	120.020.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
<b>Data WP3WT</b>				
83	Data Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori I	1 Desa	148.468.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
84	Data Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori II	1 Desa	128.300.000	Sulut, Sulteng,Sultra, NTB, Kepri, Babel
85	Data Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori III	1 Desa	122.192.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
86	Data Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori IV	1 Desa	115.040.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
87	Data Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori V	1 Desa	122.232.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
88	Data Pertanahan Pulau-Pulau Kecil Kategori I	1 Desa	159.150.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
89	Data Pertanahan Pulau-Pulau Kecil Kategori II	1 Desa	133.504.000	Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babel
90	Data Pertanahan Pulau-Pulau Kecil Kategori III	1 Desa	125.328.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
91	Data Pertanahan Pulau-Pulau Kecil Kategori IV	1 Desa	116.654.000	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
92	Data Pertanahan Pulau-Pulau Kecil Kategori V	1 Desa	116.976.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali
93	Data Pertanahan Wilayah Tertentu Kategori I	1 Desa	148.468.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
94	Data Pertanahan Wilayah Tertentu Kategori II	1 Desa	128.300.000	Sulut,Sulteng,Sultra, NTB, Kepri, Babel
95	Data Pertanahan Wilayah Tertentu Kategori III	1 Desa	122.192.000	Sulbar, SuLsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
96	Data Pertanahan Wilayah Tertentu Kategori IV	1 Desa	115.040.000	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
97	Data Pertanahan Wilayah Tertentu Kategori V	1 Desa	122.232.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	<b>Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta</b>			
	1 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	2 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	57.378.000	
	3 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	23.400.000	
	4 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.100.000	
	5 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	42.220.000	
	6 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	7 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	57.378.000	
	8 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	23.400.000	
	9 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	10 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	13.080.000	
	11 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	6.700.000	
	12 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	24.990.000	
	13 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	60.828.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan</b>			
	14 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
	15 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.570.000	
	16 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.350.000	
	17 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	33.979.000	
	18 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
	19 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	20.371.000	
	20 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.080.000	
	21 Tindak Lanjut Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	9.943.000	
	22 Tindak Lanjut Penertiban Luar Kota	1 Layanan	21.377.000	
	23 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	57.915.000	
	24 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio (Transportasi Udara)	1 Layanan	35.290.000	
	25 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota ( Transportasi Udara )	1 Layanan	35.290.000	
	26 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung</b>			
	27 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.979.000	
	28 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.610.000	
	29 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	25.900.000	
	30 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	36.190.000	
	31 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.510.000	
	32 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	28.610.000	
	33 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.160.000	
	34 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.170.000	
	35 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	16.175.000	
	36 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	26.170.000	
	37 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	64.008.000	
	38 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	86.973.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang</b>			
	39 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.970.000	
	40 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.040.000	
	41 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.030.000	
	42 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	57.244.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	43 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.990.000	
	44 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.070.000	
	45 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.990.000	
	46 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.320.000	
	47 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	33.374.000	
	48 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	63.641.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya</b>			
	49 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.662.000	
	50 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.887.000	
	51 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	22.575.000	
	52 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	79.299.000	
	53 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	33.260.000	
	54 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.792.000	
	55 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.660.000	
	56 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	92.501.000	
	57 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.662.000	
	58 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	21.887.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda</b>			
	59 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
	60 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
	61 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	39.700.000	
	62 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.300.000	
	63 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.250.000	
	64 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	59.370.000	
	65 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
	66 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
	67 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	40.700.000	
	68 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.300.000	
	69 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
	70 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
	71 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	10.665.000	
	72 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota		37.266.000	
	73 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	69.627.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar</b>			
	74 Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.000.000	
	75 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	24.800.000	
	76 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	77 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	16.520.000	
	78 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	68.050.000	
	79 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.255.000	
	80 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	23.300.000	
	81 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	82 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	23.300.000	
	83 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	84 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.000.000	
	85 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	14.600.000	
	86 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Makassar	1 Layanan	106.660.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru</b>			
87	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
88	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.227.000	
89	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.500.000	
90	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	59.560.000	
91	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	25.390.000	
92	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.162.000	
93	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
94	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.930.000	
95	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	83.460.000	
96	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.130.000	
97	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.495.000	
98	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
99	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Layanan	33.130.000	
100	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	85.685.000	
101	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	48.395.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang</b>			
102	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
103	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.000.000	
104	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.190.000	
105	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	58.850.000	
106	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
107	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	19.000.000	
108	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	18.650.000	
109	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.450.000	
110	Tidak Lanjut Hasil Penertiban		24.242.000	
111	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	45.875.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta</b>			
112	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	4.510.000	
113	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	10.303.000	
114	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota ( D.I Yogyakarta )	1 Layanan	20.106.000	
115	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	34.366.000	
116	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	3.840.000	
117	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	7.820.000	
118	Pengukuran Frekuensi Radio (D.I Yogyakarta)	1 Layanan	12.270.000	
119	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	31.900.000	
120	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	31.457.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar</b>			
121	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.000.000	
122	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.600.000	
123	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	20.050.000	
124	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	76.480.000	
125	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.000.000	
126	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.600.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
127	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.600.000	
128	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	58.490.000	
129	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	31.170.000	
130	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.450.000	
131	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.450.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang</b>			
132	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.600.000	
133	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	24.800.000	
134	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	40.445.000	
135	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	22.170.000	
136	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	33.060.000	
137	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	51.500.000	
138	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	5.900.000	
139	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	23.400.000	
140	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Isin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	40.445.000	
141	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	5.900.000	
142	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	23.400.000	
143	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	40.445.000	
144	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang	1 Layanan	10.400.000	
145	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.030.000	
146	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	27.515.000	
147	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	106.875.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado</b>			
148	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
149	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	27.252.000	
150	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.905.000	
151	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	74.869.000	
152	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.031.000	
153	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Sulut	1 Layanan	30.230.000	
154	Pengukuran Frekuensi Radio Sulut	1 Layanan	26.162.000	
155	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	15.262.000	
156	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	37.737.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura</b>			
157	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
158	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.360.000	
159	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	63.652.000	
160	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	61.772.000	
161	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	20.730.000	
162	Penertiban Prekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	122.304.000	
163	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
164	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.360.000	
165	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	63.610.000	
166	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	61.604.000	
167	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
168	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota	1 Layanan	57.372.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	169 Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
	170 Tindak Lanjut Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	63.532.000	
	171 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	13.545.000	
	172 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	52.041.000	
	173 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	39.500.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh</b>			
	174 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	4.380.000	
	175 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di luar Kota [Aceh]	1 Layanan	21.730.000	
	176 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika di luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut [Aceh]	1 Layanan	23.351.000	
	177 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	20.610.000	
	178 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [Aceh]	1 Layanan	48.014.000	
	179 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	4.230.000	
	180 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio di Luar Kota [Aceh]	1 Layanan	31.477.000	
	181 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	4.380.000	
	182 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	21.730.000	
	183 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota dengan Menggunakan Kapal Laut	1 Layanan	22.510.000	
	184 Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota [Aceh]	1 Layanan	11.332.000	
	185 Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota [Aceh]	1 Layanan	35.837.000	
	186 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	34.899.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam</b>			
	187 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.660.000	
	188 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	20.077.000	
	189 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.148.000	
	190 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	27.820.000	
	191 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	61.581.000	
	192 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	193 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.598.000	
	194 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.348.000	
	195 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.040.000	
	196 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.148.000	
	197 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.348.000	
	198 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	34.438.000	
	199 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	36.151.000	
	200 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	61.361.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Padang</b>			
	201 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
	202 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.620.000	
	203 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	36.750.000	
	204 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	12.725.000	
	205 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	30.082.000	
	206 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.074.000	
	207 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	19.025.000	
	208 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Transportasi Laut	1 Layanan	36.750.000	
	209 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
	210 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.250.000	
	211 Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	36.750.000	
	212 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	30.028.000	
	213 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	13.280.000	
	214 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	26.630.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Jambi</b>			
215	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.220.000	
216	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.700.000	
217	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.402.000	
218	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	42.202.000	
219	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
220	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	19.150.000	
221	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	19.550.000	
222	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.340.000	
223	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	62.090.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Bengkulu</b>			
224	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
225	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
226	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	24.357.000	
227	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.652.000	
228	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	40.830.000	
229	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu	1 Layanan	8.600.000	
230	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
231	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
232	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
233	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
234	Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	51.100.000	
235	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	32.350.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Lampung</b>			
236	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.500.000	
237	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
238	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	11.155.000	
239	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	30.426.000	
240	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.825.000	
241	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
242	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
243	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
244	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	4.360.000	
245	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	6.216.000	
246	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	26.730.000	
247	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	35.114.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak</b>			
248	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
249	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
250	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
251	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.455.000	
252	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.225.000	
253	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
254	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
255	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	23.563.000	
256	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.900.000	
257	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000	
258	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000	
259	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	10.660.000	
260	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	59.052.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin</b>			
261	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
262	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.025.000	
263	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.525.000	
264	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	42.700.000	
265	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.230.000	
266	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	21.920.000	
267	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	21.920.000	
268	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	19.030.000	
269	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	59.050.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya</b>			
270	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.295.000	
271	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.700.000	
272	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.600.000	
273	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	71.730.000	
274	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.290.000	
275	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	22.182.000	
276	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.125.000	
277	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.200.000	
278	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1 Layanan	5.300.000	
279	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	78.495.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Mataram</b>			
280	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.775.000	
281	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
282	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
283	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
284	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
285	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	19.080.000	
286	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	55.408.000	
287	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	60.315.000	
288	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	84.982.000	
289	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.775.000	
290	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
291	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
292	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
293	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
294	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota [NTB]	1 Layanan	5.950.000	
295	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Darat	1 Layanan	22.450.000	
296	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.625.000	
297	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	14.620.000	
298	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota [NTB] Transportasi Udara	1 Layanan	37.660.000	
299	Tindak Lanjut Hasil Penertiban [NTB]	1 Layanan	50.545.000	
300	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [NTB]	1 Layanan	56.850.000	
301	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [NTB]	1 Layanan	62.300.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Palu</b>			
302	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
303	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.100.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
304	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	29.528.000	
305	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	65.015.000	
306	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
307	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.230.000	
308	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	29.100.000	
309	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.925.000	
310	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.050.000	
311	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	29.525.000	
312	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	41.300.000	
313	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	77.022.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Kendari</b>			
314	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
315	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	21.850.000	
316	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	23.450.000	
317	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	33.250.000	
318	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	30.110.000	
319	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	40.500.000	
320	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
321	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	20.800.000	
322	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	26.830.000	
323	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	33.600.000	
324	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
325	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	21.850.000	
326	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Laut	1 Layanan	23.850.000	
327	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Transportasi Udara	1 Layanan	31.200.000	
328	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	14.180.000	
329	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	55.030.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke</b>			
330	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	7.450.000	
331	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	50.440.000	
332	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	36.700.000	
333	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	111.670.000	
334	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.320.000	
335	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	48.650.000	
336	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	55.820.000	
337	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	132.560.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Ambon</b>			
338	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.347.000	
339	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	24.706.000	
340	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	22.355.000	
341	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	17.906.000	
342	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	28.170.000	
343	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	39.650.000	
344	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.347.000	
345	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	23.940.000	
346	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	22.108.000	
347	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.347.000	
348	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	12.439.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	349 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	22.108.000	
	350 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	7.846.000	
	351 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	48.554.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Ternate</b>			
	352 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.456.000	
	353 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.200.000	
	354 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	29.150.000	
	355 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.090.000	
	356 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	59.440.000	
	357 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	67.340.000	
	358 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota		6.725.000	
	359 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Laut		24.200.000	
	360 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara		29.150.000	
	361 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000	
	362 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	23.675.000	
	363 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	29.150.000	
	364 Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	22.170.000	
	365 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	42.850.000	
	366 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.275.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang</b>			
	367 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	368 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	16.850.000	
	369 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	23.600.000	
	370 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	371 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	16.850.000	
	372 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	23.600.000	
	373 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	374 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	16.850.000	
	375 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	23.600.000	
	376 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	7.630.000	
	377 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	19.520.000	
	378 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	22.625.000	
	379 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.910.000	
	380 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	40.675.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Gorontalo</b>			
	381 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	382 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	383 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.460.000	
	384 Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	70.060.000	
	385 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	386 Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	387 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	388 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	389 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota		5.480.000	
	390 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	21.810.000	
	391 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	22.370.000	
	392 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	38.470.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang</b>			
	393 Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.890.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
394	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.225.000	
395	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.551.000	
396	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	56.516.000	
397	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.100.000	
398	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	1 Layanan	19.800.000	
399	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.310.000	
400	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.250.000	
401	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	46.860.000	
402	Ujian Negara Amatir Dalam Kota	1 Layanan	19.910.000	
403	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.335.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Manokwari</b>			
404	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
405	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Dara	1 Layanan	68.441.000	
406	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	61.941.000	
407	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut dan Udara	1 Layanan	68.441.000	
408	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.250.000	
409	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	117.056.000	
410	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
411	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	70.441.000	
412	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	72.941.000	
413	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara dan Laut	1 Layanan	70.441.000	
414	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.700.000	
415	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	70.441.000	
416	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	72.941.000	
417	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara dan Laut	1 Layanan	70.441.000	
418	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	37.903.000	
419	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	82.742.000	
420	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	12.200.000	
421	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	68.180.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Loka Mamuju</b>			
422	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.150.000	
423	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.800.000	
424	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.406.000	
425	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	58.350.000	
426	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.150.000	
427	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.750.000	
428	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.150.000	
429	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.750.000	
430	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	7.300.000	
431	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	34.190.000	
432	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	56.990.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta</b>			
433	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
434	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Koordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	9.610.000	
435	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	12.660.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan</b>			
436	Penanganan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
437	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.007.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung</b>			
438	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.232.000	
439	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.812.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang</b>			
440	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.347.000	
441	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.680.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya</b>			
442	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.950.000	
443	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.887.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda</b>			
444	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
445	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.300.000	
446	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	40.700.000	
447	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.300.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar</b>			
448	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar	1 Layanan	21.800.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru</b>			
449	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
450	Penanganan Gangguan Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	19.800.000	
451	Penanganan Gangguan Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	32.535.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang</b>			
452	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
453	Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	19.000.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta</b>			
454	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	14.100.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar</b>			
455	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.000.000	
456	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.600.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang</b>			
457	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	5.900.000	
458	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.400.000	
459	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	40.445.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado</b>			
460	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	26.390.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura</b>			
461	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
462	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	55.054.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh</b>			
463	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.380.000	
464	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.730.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam</b>			
465	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.040.000	
466	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.348.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang</b>			
467	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.450.000	
468	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.250.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi</b>			
469	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	19.350.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu</b>			
470	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
471	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung</b>			
472	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
473	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak</b>			
474	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
475	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.660.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin</b>			
476	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000	
477	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.920.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya</b>			
478	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.025.000	
479	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.100.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram</b>			
480	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.850.000	
481	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	23.525.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu</b>			
482	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
483	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.830.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari</b>			
484	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
485	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.850.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke</b>			
486	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.770.000	
487	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	47.050.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari</b>			
488	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.600.000	
489	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	75.615.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju</b>			
490	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.150.000	
491	Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.750.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon</b>			
492	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.110.000	
493	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.364.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate</b>			
494	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.825.000	
495	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	29.150.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang</b>			
496	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
497	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	16.850.000	
498	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.200.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo</b>			
499	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
500	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang</b>			
501	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.810.000	
502	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.775.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	<b>Badan Narkotika Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Laporan	280.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional</b>			
	2 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	51.385.400	
	3 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.926.326	
	4 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	14.628.800	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah</b>			
	5 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	37.055.000	
	6 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	18.870.914	
	7 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	11.869.142	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka</b>			
	8 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	47.565.000	
	9 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.480.666	
	10 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	10.371.069	
	11 Program Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	1.250.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam</b>			
	12 Program Rehabilitasi 12 Bulan	1 Orang	35.718.666	
	13 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.351.145	
	14 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	9.750.216	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda</b>			
	15 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.060.500	
	16 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	9.647.150	
	17 Program Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	740.400	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik Badan Narkotika Nasional di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Deli Serdang</b>			
	18 Program Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	18.423.750	
	19 Program Rehabilitasi 3 Bulan	1 Orang	8.854.470	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)  Layanan Informasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu  1 Layanan Informasi Tanda Waktu	1 Layanan	290.000.000	

AGU



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	<p><b>Badan Tenaga Nuklir Nasional</b></p> <p><b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b></p> <p>1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong</p> <p>2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong</p> <p>3 Laporan Hasil Uji Profisiensi Laboratorium Pengukuran Radioaktivitas di Lingkungan BATAN</p> <p>4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia</p> <p><b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b></p> <p><b>Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas</b></p> <p>5 Pengolahan Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Bekas</p> <p>6 Pengolahan Limbah Radioaktif Padat</p> <p>7 Pengolahan Limbah Radioaktif Cair</p>	<p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	<p>111.705.000</p> <p>95.593.000</p> <p>223.115.000</p> <p>249.667.000</p> <p>289.337.000</p> <p>330.813.000</p> <p>534.464.000</p>	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	<p><b>Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</b>  <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Layanan Jasa Teknologi Polimer (PNBP)</b></p>			
	1 Layanan Jasa Pelatihan Teknologi <i>Polimer</i>	14 Layanan	284.620.000	
	<p><b>Layanan Jasa Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi (PNBP)</b></p>			
	2 Audit Internal Sistem Mutu SNI ISO/IEC fiA2322017 (suboutput)	1 Layanan Teknologi	40.535.000	
	<p><b>Layanan Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perakayasa Dan Teknisi Litkayasa</b></p>			
	3 Penilaian Angka Kredit JFP Tingkat Pusat	1 Layanan	383.320.000	
	<p><b>Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika (PNBP)</b></p>			
	4 Layanan Bunga Rampai Teknologi <i>Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika</i>	1 Layanan Teknologi	36.513.000	
	5 Layanan Jurnal Teknologi <i>Aerodinamika, Aeroakustika, dan Aeroelastika</i> (output)	1 Layanan Teknologi	31.636.000	
	6 Audit Internal Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2008 & Pedoman KNAPPP 02	1 Layanan Teknologi	40.535.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	<b>Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi	23.690 Data	557.000.000	
	2 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Sumedang)	37 GB	90.000.000	
	3 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pasuruan)	94 GB	98.000.000	
	4 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pontianak)	145 GB	103.000.000	
	5 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Agam)	461 GB	183.000.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Standardisasi Nasional (084)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
084.01	<p><b>Badan Standardisasi Nasional</b>  <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b></p> <p><b>Standar Nasional Indonesia (SNI)</b></p> <p>1 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI</p> <p>2 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-<i>Reprint</i> dari Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI</p> <p>3 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI</p> <p>4 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI</p>	<p>1 SNI</p> <p>1 SNI</p> <p>1 SNI</p> <p>1 SNI</p>	<p>135.000.000</p> <p>49.500.000</p> <p>135.000.000</p> <p>135.000.000</p>	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu</b>			
1	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	55.360.000	
2	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	30.477.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
3	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	66.183.000	
4	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	37.384.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DKI Jakarta</b>			
5	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	26.590.000	
6	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	15.310.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Barat</b>			
7	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	56.362.000	
8	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	32.022.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah</b>			
9	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	58.763.000	
10	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	27.056.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DI Yogyakarta</b>			
11	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	66.696.000	
12	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	36.440.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Timur</b>			
13	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	58.760.000	
14	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	31.235.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Aceh</b>			
15	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	57.331.000	
16	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	30.525.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi-Sumatera Utara</b>			
17	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	55.349.000	
18	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	29.349.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan</b>			
19	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	65.062.000	
20	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	35.460.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi-Sumatera Barat</b>			
21	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	57.166.000	
22	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	30.247.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Barat</b>			
23	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	55.936.000	
24	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	30.716.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
25	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	55.199.000	
26	LHP Consulting pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	29.825.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Utara</b>			
27	LHP Assurance pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	64.634.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
28	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan</b>	1 Laporan	33.570.000	
29	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	61.593.000	
30	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku</b>	1 Laporan	32.421.000	
31	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	94.736.000	
32	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bali</b>	1 Laporan	59.093.000	
33	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	76.365.000	
34	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Irian Jaya</b>	1 Laporan	42.202.000	
35	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	113.887.000	
36	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau</b>	1 Laporan	69.384.000	
37	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	65.880.000	
38	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Lampung</b>	1 Laporan	35.823.000	
39	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	47.955.000	
40	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Timur</b>	1 Laporan	26.347.000	
41	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	79.832.000	
42	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jambi</b>	1 Laporan	46.259.000	
43	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	52.373.000	
44	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah</b>	1 Laporan	28.235.000	
45	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	71.567.000	
46	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	1 Laporan	35.664.000	
47	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	73.374.000	
48	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Banten</b>	1 Laporan	42.987.000	
49	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	56.702.000	
50	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Riau</b>	1 Laporan	34.477.000	
51	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	70.596.000	
52	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	1 Laporan	40.679.000	
53	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	56.865.000	
54	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	1 Laporan	30.736.000	
55	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	60.421.000	
56	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah</b>	1 Laporan	32.599.000	
57	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	60.153.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
58	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Barat</b>	1 Laporan	33.195.000	
59	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	63.525.000	
60	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Gorontalo</b>	1 Laporan	32.745.000	
61	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	64.064.000	
62	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara</b>	1 Laporan	33.346.000	
63	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	67.337.000	
64	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Papua Barat</b>	1 Laporan	36.884.000	
65	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	89.158.000	
66	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Utara</b>	1 Laporan	50.075.000	
67	LHP <i>Assurance</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	79.846.000	
68	LHP <i>Consulting</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	46.332.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Perdagangan (090)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	<p>Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p> <p>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</p> <p>Layanan Sertifikasi</p>			
	1 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	10.191.000	Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Perdagangan (evaluasi lapangan)
	2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	20.799.000	telah menerima uang harian dari wajib bayar sesuai Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan, maka tidak diberikan lagi belanja jasa lainnya/jasa profesi
	3 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Dalam Negeri	1 Sertifikat	1.760.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Perusahaan Luar Negeri	1 Sertifikat	3.808.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	<b>Komisi Yudisial RI</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Investigasi Pendalaman Kasus</b>			
	1 Investigasi Pendalaman Kasus	20 Laporan	1.126.650.000	
	2 Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan	4 Laporan	570.140.000	
	<b>Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim</b>			
	3 Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung di MA	30 Laporan	1.418.295.000	
	4 Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini	1 Laporan	386.137.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b> <b>Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa</b>			
	1 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah di LKPP	108 Penyelenggaraan	37.800.000	
	2 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah di Daerah	60 Penyelenggaraan	645.630.000	
	3 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional	20 Penyelenggaraan	1.291.532.000	
	4 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi Non jabatan Fungsional	10 Penyelenggaraan	746.938.000	
	5 Kegiatan Sertifikasi Profesi barang/jasa pemerintah berbasis Kompetensi <i>Inpassing</i>	15 Penyelenggaraan	265.298.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	<b>Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Program, Produksi, dan Pengembangan Siaran Internasional</b>			
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	3.624.000	
	2 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	820.000	
	3 Program Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	689.000	
	4 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.732.000	
	5 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	471.000	
	6 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.522.000	
	7 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	341.000	
	8 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	531.000	
	<b>Program, Produksi Siaran, dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional, dan Nasional</b>			
	9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	1.104.000	
	10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	4.485.000	
	11 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	177.000	
	12 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	794.000	
	13 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	609.000	
	14 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	906.000	
	15 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.731.000	
	16 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	848.000	
	17 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	370.000	
	18 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Paket Acara	1.658.000	
	19 Program Siaran Pergelaran	1 Paket Acara	13.225.000	
	20 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	417.000	
	21 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.316.000	
	22 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.405.000	
	23 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	425.000	
	24 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	300.000	
	25 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	74.000	
	26 Program Produksi Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	2.737.000	
	27 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	532.000	
	<b>Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan</b>			
	28 Program Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	4.225.000	
	29 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	5.625.000	
	30 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	466.000	
	31 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	793.000	
	32 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	608.000	
	33 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	895.000	
	34 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.729.000	
	35 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	849.000	
	36 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	370.000	
	37 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	851.000	
	38 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.315.000	
	39 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.355.000	
	40 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	425.000	
	41 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	303.000	
	42 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	73.000	
	43 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	534.000	
	44 Program Siaran Adlibs	1 Paket Acara	134.000	
	45 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	4.590.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001